

**Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Waralaba  
Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Islam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum  
pada Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

**DIRHAMZAH**

**NIM:10400111012**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2015**

**Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Waralaba  
Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum**

**Islam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum**

**pada Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

**DIRHAMZAH**

**NIM:10400111012**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dirhamzah  
NIM : 10400111012  
Tempat/tgl. Lahir : Sungguminasa, 05 Desember 1986  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jl. Abd. Muthalib Dg. Narang No.110 Sungguminasa  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Waralaba Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 2015

Penyusun,

Dirhamzah

NIM: 10400111012



## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Warlaba Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”, yang disusun oleh Dirhamzah, NIM: 10400111012, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam siding munaqasyah yang diselenggarakan pada hari , Jumat, 18 September 2015 M, bertepatan dengan 04 Dzulhijjah 1436 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Samata, 11 Mei 2019 M

06 Ramadhan 1440 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Abdillah Mustari, M. Ag	(.....)
Munaqisy I	: Rahman Syamsuddin, S.H, M.H	(.....)
Munaqisy II	: Abdi Wijaya, S.S., M. Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Abdul Wahid Hadade, Lc	(.....)
Pembimbing II	: Andi Intan Cahyani, M. Ag	(.....)

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

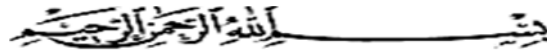
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag

NIP. 19621016 199003 1 003



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan serta telah melimpahkan hidayah dan inayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Waralaba Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”** sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi) pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar. Salam dan Shalawat tak lupa pula kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW., suri tauladan seluruh umat manusia, serta para sahabat yang telah memperjuangkan Islam sebagai agama samawi sekaligus sebagai aturan hidup di dunia menuju kehidupan yang kekal di akhirat nanti.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari beberapa pihak terkait yang telah memberikan sumbangsih baik berupa bimbingan, dorongan, dan bantuan yang diberikan, kiranya dicatat oleh Allah swt., sebagai amal saleh. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Arifin K. dan Ibunda Hasnawati, yang selalu memberikan motivasi dan do'a yang tiada henti. Semoga Allah swt. melimpahkan Ridho-Nya kepada keduanya.

2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan seluruh wakil dekan sejawatan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar..
3. Bapak Dr. Abdillah Mustari., M. Ag selaku Ketua Jurusan dan Ahmad Musyahid Idrus, S.Ag., M.ag selaku Sekertaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bimbingan, nasehat, petunjuk, dan saran, sehingga penulisan skripsi ini dapat saya selesaikan.
4. Bapak Dr. H. Abdul Wahid Haddade, Lc, M.Hi. dan Ibu Andi Intan Cahyani, M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan kesabaran meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing, memberikan masukan-masukan keilmuan yang sangat berharga hingga saat selesainya penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang pernah mengajar dan membimbing. Permohonan maaf apabila ada perbuatan, ucapan serta tingkah laku yang tidak sepatutnya pernah penulis lakukan.
6. Saudara-saudari senasib seperjuangan jurusan PMH angkatan 2011, terima kasih atas kebersamaannya, pesanku tetaplah semangat jangan mudah menyerah dalam menggapai cita-citamu dan jadilah hamba Allah yang senantiasa istiqamah dalam menjalani kehidupan ini.

7. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kasubag Kepegawaian, Umum dan Humas Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar, beserta seluruh aparatur di lingkungan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dimana penulis mengabdikan dan berkarya sebagai seorang aparatur sipil Negara selama ini, dukungan semua pihak dan bantuannya selama penulis menjalani perkuliahan sejak tahun 2011 sungguh sangat berarti di mata penulis, semoga Allah SWT melimpahkan balasan kebaikan bagi kita semua.

Segala usaha dan upaya semaksimal mungkin telah dilakukan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. Amin

*Wassalamu' Alaikum Wr. Wb*

Makassar,

2015

Penyusun,

DIRHAMZAH

NIM:10400111012

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup .....	9
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Metodologi Penelitian .....	12
F. Tujuan dan Kegunaan .....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM EKONOMI SYARIAH.....	19
A. Positivasi Hukum Islam di Indonesia .....	19
B. Latar Belakang dan Proses Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	32
C. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatahan Hukum Positif di Indonesia.....	45
BAB III KONSEP WARLABA DAN KEADILAN DALAM ISLAM .....	48
A. Konsep Warlaba .....	48
B. Manfaat Bisnis Warlaba.....	55
C. Royalty Fee dan Franchise Fee.....	57



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	76
A. Sistem Pelaksanaan Warlaba Menurut Hukum Islam .....	76
B. Analisis Penerapan Materi Hukum Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bisnis Warlaba.....	81
BAB V PENUTUP .....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran .....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	88



## **ABSTRAK**

**NAMA PENULIS : DIRHAMZSH**

**NIM : 10400111012**

**JUDUL SKRIPSI : Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Waralaba ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

---

Skripsi ini berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Waralaba ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang meneliti tentang penerapan Hukum Ekonomi Syariah dalam menjalankan bisnis Waralaba. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah (1) bagaimanakah sistem pelaksanaan waralaba menurut hukum Islam? (2) bagaimana penerapan materi hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap bisnis waralaba syariah? (3) bagaimana analisis pelaksanaan waralaba syariah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ?

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan sistem Waralaba dalam hukum Islam dalam kaidah Fiqih dikatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalat dibenarkan syara', kecuali bila terdapat dalil-dalil Al Quran atau Hadits Nabi yang melarangnya sehingga dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan umum dalam hukum Islam bahwa prinsip dasar bermuamalah harus dipenuhi perjanjian untuk kegiatan yang mengandung maslahat, menjunjung tinggi prinsip keadilan, jujur, saling tolong menolong, tidak mempersulit, suka sama suka, serta menjauhi segala unsur penyimpangan bisnis dan mengedepankan nilai syariah sebagai filter moral bisnisnya. (2) Pelaksanaan Waralaba yang menganut ekonomi syariah dalam pengawasan lembaga keuangan dan perdagangan syariah. (3) pelaksanaan waralaba syariah telah dilaksanakan dalam sistem perbankan syariah yang dilandasi oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Implikasi dari penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam Syariah harus lebih disosialisasikan untuk kepentingan masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Waralaba sebenarnya sudah lama dikenal di Eropa dengan nama Franchise. Kata Franchise sebenarnya berasal dari bahasa Perancis yang berarti bebas, atau lebih lengkap lagi bebas dari hambatan (free from servitude). Dalam bidang bisnis franchise berarti kebebasan yang diperoleh seorang wirausaha untuk menjalankan sendiri suatu usaha tertentu di wilayah tertentu.<sup>1</sup>

Perjanjian waralaba merupakan perjanjian khusus, karena tidak dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian ini dapat diterima dalam hukum karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditemui satu pasal yang mengatakan adanya kebebasan berkontrak. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>2</sup>

Dalam hukum Islam, dasar hukum muamalat adalah mubah (diperbolehkan) kecuali yang dilarang, maka setiap perdagangan yang tidak ada unsur riba, judi, *ghoror* (penipuan), atau barang yang haram, maka hukumnya

---

<sup>1</sup> Ricard Burthon Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 56

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)*, (Staatblad No.23, 1847), Bagian 3, Pasal 1338.

mubah sehingga dalam bisnis waralaba (*franchise*) ada beberapa faktor yang perlu dikaji agar lebih jelas peletakan hukumnya sesuai qaidah syariat.

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.<sup>3</sup> Untuk dapat mengikuti sistem ini, biasanya Anda diharuskan memenuhi beberapa persyaratan, baik berupa persyaratan administrasi atau lainnya. Namun ada beberapa masalah yang layak dikaji, karena memiliki peran besar dalam menentukan hukum sistem ini dalam syariat.

#### 1. Kekayaan Intelektual

Sistem waralaba bukan hanya melibatkan jual-beli barang atau jasa semata, namun juga melibatkan penggunaan merek dagang (brand), logo, sistem usaha, manajemen, pemasaran atau teknologi pengolahan dan lainnya. Dengan demikian pada sistem waralaba telah terjadi akad sewa-menyewa kekayaan intelektual antara pewaralaba (franchisor) sebagai pemilik, dan terwaralaba (franchisee) sebagai penyewa. Atas penggunaan berbagai kekayaan intelektual ini, terwaralaba (franchisee) wajib menanggung beberapa biaya:

1. Biaya Awal.
2. Biaya jasa manajemen atau lainnya.
3. Biaya lisensi.
4. Biaya atas layanan akuntansi.

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Waralaba*, (PP No.42, 2007), Bab 1, Pasal 1, Ayat 1.

5. Biaya pemasaran bersama, dan layanan lain yang serupa.

## 2. Pembagian Keuntungan.

Di antara poin penting yang pasti ada dalam setiap sistem waralaba ialah pembagian keuntungan. Setiap bulan, pihak terwaralaba (franchisee) diwajibkan membayar *fee* atau bagi hasil dari keuntungan kotor. Besarnya bagi hasil yang wajib dibayarkan oleh terwaralaba kepada pewaralaba berbeda-beda. Dari mereka ada yang membayar 5 % dan ada pula yang lebih hingga 15 %.

## 3. Kepemilikan Unit Usaha.

Kedua belah pihak yang menjalin kerjasama dengan sistem waralaba, masing-masing berdiri sendiri, sehingga pihak terwaralaba berhak atas laba dari usaha yang ia jalankan dan bertanggung jawab atas beban-beban usaha waralabanya. Pihak terwaralaba berkewajiban menanggung beban pajak, gaji pegawai, utang usaha dan tentunya termasuk kerugian. Ketentuan ini berlaku sebagai konsekwensi dari status pihak terwaralaba sebagai pemilik unit usaha.

Kalau dalam hukum Islam, waralaba dengan model ini hampir serupa dengan model syirkah mudharabah (bagi hasil), tapi sudah mengalami perkembangan seiring berkembangnya zaman dan terdapat gabungan dengan jenis syirkah lainnya. Syirkah (persekutuan) dalam hukum Islam banyak sekali jenisnya dan terdapat perbedaan oleh para imam madzhab. Dan perlu diketahui bahwa dalam pola transaksi yang diatur oleh hukum Islam adalah menitikberatkan pada sisi moralitas yang lebih tinggi dari pada apapun.

Muamalah dalam bentuk waralaba ini boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah yaitu:



1. Muamalah harus dilakukan atas dasar suka-sama suka, artinya tidak ada

keterpaksaan sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>4</sup>

2. Muamalah itu haru mewujudkan kemaslahatan artinya bukan mendatangkan kemudharatan sesuai dengan kaidah-kaidah ushul fiqh bahwa kemudharatan itun harus dihilangkan.

3. Muamalah itu harus terhindar dari unsur garar atau penipuan dan unsur riba. Karena riba itu haram sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ ٢٧٥

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah

<sup>4</sup> Q.S. An-Nisa (4):29

sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>5</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem waralaba yang terdapat di dalamnya istilah sewa bersyarat yaitu menyewa merek dengan syarat membayar royalty yang dibenarkan dalam hukum Islam asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Di Indonesia, penyelesaian sengketa ekonomi dan bisnis syariah ini melalui jalur litigasi (Peradilan Agama) dan non-litigasi (Badan Arbitrasi Syariah Nasional/Basyarnas). Wadahnya sudah ada, sehingga perlu dibuat materi hukumnya untuk menjadi pijakan bagi para hakim di Peradilan Agama dalam memutuskan perkara. Dengan maksud tersebut, lahirlah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut KHES).

Sejak tahun 1994, jika ada sengketa ekonomi syariah maka diselesaikan lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang hanya sebagai mediator (penengah) dan belum mengikat secara hukum. Peraturan yang diterapkan juga masih terbatas pada peraturan Bank Indonesia (BI) yang merujuk kepada fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sedangkan fatwa itu, sebagaimana dimaklumi dalam hukum Islam, adalah pendapat hukum yang tidak mengikat seluruh umat Islam. Lahirnya KHES tersebut berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU

---

<sup>5</sup> Q.S. Al Baqarah (2): 275.

No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No.3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini PA tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi syari'ah. Kaitannya dengan wewenang baru PA ini, dalam Pasal 49 UUPA diubah menjadi : "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a. bank syari'ah;

- b. lembaga keuangan mikro syari'ah;
- c. asuransi syari'ah;
- d. resuransi syari'ah;
- e. reksadana syari'ah;
- f. obligasi dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g. sekuritas syari'ah;
- h. pembiayaan syari'ah;
- i. pegadaian syari'ah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k. bisnis syari'ah.

Setelah UU No. 3 Tahun 2006 tersebut diundangkan maka Ketua MA membentuk Tim Penyusunan KHES berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum. Tugas dari Tim tersebut secara umum adalah menghimpun dan mengolah bahan (materi) yang diperlukan, menyusun draft naskah, menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama dan para pakar, menyempurnakan naskah, dan melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung.<sup>6</sup> Hasil usaha Tim ini kemudian menghasilkan seperangkat aturan hukum yang bernama Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada tahun 2008 melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 yang kemudian direvisi pada tahun 2010.

---

<sup>6</sup> Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan hukum Islam", *Al-Mawarid*, Edisi XVIII (2008), hal.144

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berkesimpulan bahwa persoalan tentang bisnis waralaba syariah ini merupakan hal yang menarik untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam, terutama jika dikaitkan dengan konsekuensi bahwa penyelesaian sengketa ekonomi dan bisnis syariah melalui jalur litigasi (Peradilan Agama) sebagai materi hukum untuk menjadi pijakan bagi para hakim di Peradilan Agama dalam memutuskan perkara terkait bisnis waralaba syariah. Karenanya penulis berniat menuangkan kajian tersebut melalui sebuah skripsi yang berjudul: **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS WARALABA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)”**.

#### ***B. Rumusan Masalah***

Sebagaimana diungkap dalam latar belakang di atas, masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap bisnis waralaba ditinjau dari sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan waralaba menurut hukum Islam?
2. Bagaimana penerapan materi hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap bisnis waralaba syariah?
3. Bagaimana analisis pelaksanaan waralaba syariah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?



### ***C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***

Defenisi Operasional Variabel dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas tentang variable-variabel yang diperhatikan sehingga tidak terjadi kesalah pahaman. Adapun judul dalam penelitian ini adalah “***Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Waralaba Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)***”. Defenisi operasional dijelaskan sebagai berikut :

1. ***Analisis***, yaitu penelitian atau pengkajian secara mendalam tentang sesuatu.
2. ***Hukum Islam***, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam,<sup>7</sup> khususnya yang berkaitan dengan waralaba sebagai salah satu bentuk muamalat dalam hal ekonomi syariah, dimana ekonomi syariah ini diartikan sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.
3. ***Bisnis Waralaba***, adalah hak istimewa (*privilege*) yang terjamin dan atau diberikan oleh pemberi waralaba (*franchisor*) kepada penerima waralaba (*franchisee*) dengan sejumlah kewajiban atau pembayaran. Dalam format bisnis, pengertian waralaba adalah pengaturan bisnis dengan sistem pemberian

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, Pengertian dan Sumber Hukum Islam (dalam Falsafah Hukum Islam), Departemen Agama, Bumi Aksara dan DEPAG, ed.1, cet.II, (Jakarta, 1992), hal. 15.

hak pemakaian nama dagang oleh *franchisor* kepada pihak independen atau *franchisee* untuk menjual produk atau jasa sesuai kesepakatan.<sup>8</sup>

4. ***Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah***, yaitu suatu aturan hukum yang disusun oleh sebuah Tim yang dibentuk oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang telah diresmikan penggunaannya melalui Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 sebagai pedoman para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian-kajian terhadap Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis waralaba Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), baik dari segi pelaksanaannya, hukum yang mengaturnya dan berbagai hal yang terkait. Terdapat beberapa pustaka yang dapat dijadikan sebagai fokus tinjauan kepustakaan berkenaan dengan topik yang dipilih penulis dalam penelitian ini.

1. Berbagai peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum di Indonesia yang terkait dengan waralaba dan ekonomi syariah diantaranya:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) Staatblad Nomor 23 tahun 1874,
  - b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan,
  - c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

---

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hal.6

- d. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
  - e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),
  - f. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten,
  - g. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,
  - h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2007 Tentang Waralaba,
  - i. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.
  - j. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
2. Ricard Burthon Simatupang, dalam buku *“Aspek hukum dalam Bisnis”*, dimana pada salah satu bagiannya membahas tentang bisnis waralaba mulai dari sejarah hingga aplikasi dari bisnis wiralaba.
  3. Ahmad Asyhar Basyir, dalam buku *“Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)”*, terdapat penjelasan mengenai prinsip-prinsip dasar tentang ekonomi syariah sebagai aspek dalam hukum perdata Islam.
  4. Abdul Halim, dalam buku *“Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia”*, yang membahas bagaimana perkembangan Peradilan Agama mulai dari masa kolonial hingga sekarang dalam menangani kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan hukum Islam.

5. Burhanuddin. S, dalam buku yang berjudul “*Hukum Kontrak Syariah*”. Dalam buku ini mengkaji hal-hal yang luas tentang aqad-aqad dalam kontrak atau perikatan sebagai prinsip syariah.
6. Gemala dewi, dalam buku “*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*”, membahas tentang asas-asas dalam hukum Islam dan bagaimana hukum perikatan Islam berjalan di Indonesia.
7. DR. H. Fathurahman Djamil, M.A., dalam buku “*Filsafat Hukum Islam*”, yang lebih menekankan pada pendekatan filsafat dalam mengkaji hukum Islam secara fundamental, konsepsional, metodelis, sistematis, radikal, universal, komprehensif, rasional serta bertanggung jawab.
8. Wirjono Projodikoro, dalam “*Azas-azas Hukum Perjanjian*”, membahas tentang bagaimana pengkategorian pihak yang beraqad dalam sudut pandang hukum perjanjian konvensional.
9. Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, “*Hapusnya Perikatan*”, di dalam bukunya terdapat pemaparan tentang akibat hukum yang dirumuskan dalam KUHPdata bahwa perjanjian yang terjadi karena kekhilafan, paksaan dan penipuan mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan berdasarkan tuntutan.

#### **E. Metodologi**

Metode merupakan salah satu sarana untuk mencapai sebuah target karena salah satunya berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu hasil yang memuaskan.

Disamping itu metode merupakan tindakan terhadap sesuatu demi pencapaian hasil yang maksimal.<sup>9</sup>

Adapun dalam skripsi ini nantinya peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam metode ini peneliti menggunakan metode bentuk pengumpulan data melalui kepustakaan (*Library research*). Secara defenitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan berbagai macam literature sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.<sup>10</sup> Kemudian dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

#### 2. Metode Pendekatan

Dalam rangka menemukan jawaban, maka peneliti menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut :

##### a. Pendekatan Yuridis

Pendekatan Yuridis yaitu metode yang digunakan untuk menafsirkan beberapa data-data tentang waralaba dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

##### b. Pendekatan Syari'i

<sup>9</sup> Anton Bakker, *Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal.10.

<sup>10</sup> Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal.50.



Pendekatan ini adalah pendekatan hukum (*syari'i*), yakni menjelaskan hukum-hukum dalam hal ini hukum yang mengaturnya berhubungan dengan ekonomi syariah untuk mengkaji bisnis waralaba ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini sesuai dengan jenis penggolongannya dalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data pustaka melalui penelusuran terhadap buku-buku literature, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.<sup>11</sup>

#### a. Sumber Primer

Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>12</sup>

#### b. Sumber Sekunder

Meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek pembahasan dalam skripsi.

### 4. Metode Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data nantinya teknik yang akan digunakan adalah :

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006), hal.129.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal.253.

- a. Kutipan langsung, yaitu peneliti mengutip pendapat atau tulisan orang secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa berubah.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip pendapat orang lain dengan cara memformulasikan dalam susunan redaksi yang baru.

#### 5. Metode Pengolahan data

Dalam pengolahan data kelak, teknik yang akan digunakan adalah :

- a. Metode Induktif, yaitu digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode Deduktif, yaitu digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan<sup>13</sup>.

### ***F. Tujuan dan Kegunaan***

#### **1. Tujuan**

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan waralaba menurut hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan materi hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap bisnis waralaba syariah.
- c. Untuk mengetahui bagaimana analisis pelaksanaan waralaba syariah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

#### **2. Manfaat**

- a. Manfaat Praktis

---

<sup>13</sup> Abd. Kadir Ahmad, “*Teknik Pengumpulan dan Analisis Data*”. Makalah yang disajikan pada Pelatihan Penelitian di UIN Alauddin, (Makassar:2012), hal.8

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat member gambaran serta masukan terhadap perkembangan hukum di Indonesia khususnya yang menyangkut Ekonomi Syariah dalam kaitannya terhadap kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES) dan perkembangan bisnis waralaba sebagai suatu fenomena baru di dunia bisnis yang telah merambah hingga ke pelosok negeri ini.

b. Manfaat Teoritis

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan tambahan ilmu pengetahuan mengenai bisnis waralaba dari sudut pandang hukum Islam dan analisis terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

***G. Kerangka Isi Penelitian (Outline)***

BAB 1 : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Definisi Operasional
- D. Kajian Pustaka
- E. Metodologi Penelitian
- F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- G. Sistematika Pembahasan

BAB II : Tinjauan Umum terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- A. Positifisasi Hukum Islam di Indonesia

- B. Latar Belakang dan Proses Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- C. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tata Hukum Positif di Indonesia

### BAB III : Tinjauan Umum terhadap Bisnis Waralaba Syariah

- A. Konsep Waralaba
  - 1. Pengertian Bisnis Waralaba
  - 2. Manfaat Bisnis Waralaba
  - 3. Royalti Fee dan Franchise Fee dalam Bisnis Waralaba
- B. Konsep Keadilan dan Kerjasama dalam Islam
  - 1. Pengertian Keadilan dalam Islam
  - 2. Manfaat Keadilan dalam Islam
  - 3. Konsep Keadilan dalam Islam
  - 4. Konsep Kerjasama dalam Islam

### BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

- A. Sistem Pelaksanaan Waralaba Menurut Hukum Islam
- B. Penerapan Materi Hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Bisnis Waralaba Syariah.
- C. Analisis Pelaksanaan Waralaba Syariah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

## BAB V : Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran





## BAB II

### TINJAUAN UMUM TERHADAP KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

#### *A. Positivisasi Hukum Islam di Indonesia*

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, hukum Islam secara sosiologis tentu saja memiliki eksistensi nyata dalam kehidupan rakyat Indonesia, khususnya dalam kalangan umat Islam yang merupakan komunitas mayoritas dalam populasi tersebut.

Meski dimaklumi bahwa Indonesia bukan negara yang menganut sistem teokrasi di mana negara tidak mendasarkan konstitusinya pada ideologi agama tertentu, namun Indonesia juga bukan negara sekuler murni yang tidak mempedulikan agama sama sekali. Relasi antara agama dengan negara di Indonesia amat sinergis dan tidak pada posisi dikotomi di mana keduanya berdiri secara terpisah tanpa keterkaitan satu sama lain. Legitimasi keberadaan agama di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dilindungi secara konstitusional.<sup>1</sup> Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa:

---

<sup>1</sup> A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, h. 1

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat ke-2 dari pasal 29 di atas mengimplikasikan bahwa pengamalan hukum Islam merupakan konsekuensi logis dari kebebasan menjalankan ajaran agama. Sebab, bagi penganut Islam, pengamalan ajaran agama tidak hanya bermakna parsial sebagai pelaksanaan ritual ibadah saja, tapi juga mencakup makna yang lebih luas, yaitu penerapan hukum Islam dalam berbagai aspek.

Dari sini, kemudian lahirlah ide untuk positivisasi hukum Islam. Ide ini dianggap penting, sebab untuk bisa berlaku dalam sebuah negara, hukum Islam (dan juga hukum Adat) terlebih dahulu harus melalui proses positivisasi, yakni memasukkan prinsip-prinsip hukum tersebut (Islam maupun adat) ke dalam peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Menurut A. Qodri Azizy, yang dimaksud positivisasi jika ditinjau dari aspek akademik mestilah tetap melalui proses keilmuan dalam disiplin ilmu hukum (*jurisprudence*), dan tetap dalam koridor demokratisasi jika ditinjau dari segi sistem politik yang demokratis. Dalam hal ini, tentu ada strategi dan pendekatan yang lain yang biasanya dilaksanakan oleh pemerintah di negara yang mengklaim sebagai negara yang menjalankan atau mengakomodir syari'at Islam, yaitu dengan menggunakan logika dan dasar bahwa setiap orang Islam harus menjalankan syariat

---

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, h. 6

Islam.<sup>3</sup> Dengan mengingat bahwa hukum Islam itu merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka negara tentu saja tidak dapat merumuskan kaidah hukum positif yang nyata-nyata bertentangan dengan kesadaran hukum rakyatnya sendiri. Demokrasi harus mempertimbangkan hal ini. Jika sebaliknya (negara memaksakan suatu hukum kepada rakyat, di mana aturan hukum tersebut bertentangan dengan nilai yang dianut oleh rakyat tersebut) , maka negara akan menjadi suatu sistem otoriter yang memaksakan kehendaknya sendiri kepada rakyatnya. Contoh sederhana misalnya dapat diilustrasikan di bidang hukum perburuhan, di mana idealnya harus ada aturan yang memberikan kesempatan kepada buruh beragama Islam untuk menunaikan sholat Jum'at misalnya. Begitu juga di bidang haji dan zakat, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan jemaah haji, administrasi zakat dan seterusnya. Pengaturan seperti ini, berkaitan erat dengan fungsi negara yang harus memberikan pelayanan kepada rakyat. Pada tataran realistis, meski konstitusi telah memberikan payung hukum bagi pengamalan hukum Islam tersebut, tapi kenyataan justru menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam dalam kerangka berbangsa dan bernegara merupakan salah satu objek perdebatan yang tak kunjung selesai dibahas dan diperbincangkan oleh para pakar hukum dan politik di Indonesia sejak dulu.

Bila menilik dari perjalanan sejarah yang lebih jauh ke belakang, wacana positivisasi dan penerapan hukum Islam di Indonesia sebenarnya sudah sejak lama

---

<sup>3</sup> A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum)*, Gama Media Offset, Yogyakarta, 2004, h. 173

dibahas. Hal ini dapat dilihat dari refleksi perjalanan politik hukum Islam di Indonesia sejak zaman penjajahan Hindia Belanda.

Pada masa kolonial, negara yang bernama Indonesia belum lahir wujud. Yang dikenal adalah kerajaan-kerajaan nusantara dengan kekuasaannya masing-masing. Pada masa itu, khususnya setelah Islam dipeluk oleh penduduk kerajaan-kerajaan nusantara, Raja atau Sultan kemudian menjadikan hukum Islam sebagai pedoman dalam mengurus negara meskipun tanpa legislasi secara formal.<sup>4</sup>

Persoalan pengundangan saat itu belum menjadi sesuatu yang dibutuhkan, karena hukum Islam telah dianggap sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Artinya, hukum Islam dapat berlaku dengan sendirinya tanpa intervensi negara. Namun demikian, perangkat penegakan hukum juga telah berdiri, seperti lembaga Kayim, Penghulu Agung, Balai Hukum Mukim, peradilan atau kerapatan Qadhi dan lain sebagainya. Bahkan, beberapa kerajaan di Nusantara telah mengundangkan hukum Islam secara formal dan tertulis. Sejarah mencatat, bahwa kerajaan Melaka (1405- 1511) yang kekuasaannya meliputi semenanjung Melayu, pantai timur Sumatera bagian tengah, pantai barat Kalimantan dan pulau-pulau yang terletak di antara ketiga titik tersebut meninggalkan suatu kitab undang-undang yang dikenal dengan nama: "*Undang-undang Melaka*". Undang-undang ini merupakan kompilasi dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh sultan-sultan Melaka dari zaman ke zaman dan berlaku di wilayah kekuasaan kerajaan tersebut serta kerajaan-

---

<sup>4</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, h. 47

kerajaan yang mewarisinya seperti kerajaan Riau-Johor. Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan hukum syariah di bidang pidana, perdata (perkawinan dan perjanjian) serta beberapa aspek hukum acara.

Dari Kerajaan Aceh diperoleh pula sejumlah dokumen hukum Islam yang ditulis oleh beberapa ulama atas perintah Sultan-sultan Aceh. Salah satu di antaranya adalah kitab *Safīnah al-Hukkām fī Takhlīsh al-Khishām*, suatu karya berbahasa Melayu dalam huruf Arab yang disusun oleh Jalaluddin al-Tarusani atas perintah Sultan Alauddin Johansyah (1147-1174/1734-1760), sultan ke-34 dari Kesultanan Aceh Darussalam. Kitab ini merupakan pedoman hukum dalam Kesultanan Aceh Darussalam. Penyusunnya sendiri menerjemahkan judul Arab karya ini ke dalam bahasa Melayu dengan: “*Bahtera Segala Hakim pada Menyelesaikan Segala Orang yang Berkesumat*”. Sebagian besar isi buku ini memuat ketentuan hukum acara, di samping juga memuat ketentuan hukum materiil di bidang perdata serta pidana.

Kehadiran kolonial Eropa –khususnya Belanda di Indonesia- dianggap telah membawa petaka bagi umat Islam seiring dengan jatuhnya satu per satu kerajaan-kerajaan Islam di nusantara. Meski demikian, pada mulanya, politik kolonial Belanda sebenarnya masih memberi ruang bagi eksistensi hukum Islam, setidaknya sampai akhir abad ke 19 M dikeluarkannya Staatsblad Nomor 152 Tahun 1882 yang beriringan dengan munculnya teori *Receptio in Complexu* yang dikembangkan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg.<sup>30</sup> Menurut ahli hukum Belanda ini,

hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam, maka hukum Islamlah yang berlaku baginya.<sup>5</sup> Dengan adanya teori *receptio in complexu* ini, maka hukum Islam didudukkan sejajar dengan sistem hukum lainnya di Hindia Belanda waktu itu.

Pada masa ini, beberapa aturan Islam diakui –meski dipersempit- oleh Belanda, dan beberapa di antaranya dpositifkan dalam bentuk formal. Pengakuan terhadap eksistensi tersebut dapat dilihat dari dikeluarkannya *Resolutie der Indiesche Regeering* pada 25 Mei 1760 yang merupakan aturan hukum sipil yang terdiri atas hukum perkawinan dan kewarisan Islam atau yang disebut juga sebagai *civiele wetten der Mohammadansche recht*. Aturan ini diberlakukan oleh pengadilan-pengadilan VOC. Selain itu, dikenal juga beberapa *compendium* (kompilasi hukum) yang disusun oleh pejabat-pejabat dan pakar hukum Belanda seperti *Compendium van Clookwijck* dan *Compendium Freijer* yang dibuat Gubernur Jenderal Jacob Mossel (1750-1761). Contoh lain adalah dikeluarkannya Keputusan Raja Belanda (*Koninklijk Besluit*) oleh Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam *Staatsblad* 1882 Nomor 152 tentang pembentukan atau pengakuan lembaga peradilan Agama yang disebut *Priesterraden*.<sup>6</sup> Namun kondisi di atas tidak berlangsung lama, seiring dengan perubahan orientasi politik Belanda, kemudian dilakukan upaya penyempitan ruang gerak dan perkembangan hukum

---

<sup>5</sup> Moh. Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.. 242.

<sup>6</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, h. 51

Islam. Perubahan politik ini telah mengantarkan hukum Islam pada posisi kritis. Melalui ide Van Vollenhoven dan C.S. Hurgronje yang dikemas dalam konsep *Het Indische Adatrecht* yang dikenal dengan teori *Receptie*. Menurut teori ini, hukum Islam dapat berlaku apabila telah diterima atau diresepsi oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam. Klaim provokatif dan distorsif ini sangat berpengaruh terhadap eksistensi hukum Islam ketika itu. Oleh karenanya, Hazairin menyebutnya sebagai “teori Iblis”.<sup>7</sup>

Dengan adanya teori *Receptie* ini, pemerintah Hindia Belanda cukup punya alasan untuk membentuk sebuah komisi yang bertugas meninjau kembali wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Dengan bekal sebuah rekomendasi (usulan) dari komisi ini, lahirlah Staatsblad Nomor 116 dan 638 Tahun 1937 yang berisi pencabutan wewenang Pengadilan Agama untuk menangani masalah waris dan lainnya. Perkara-perkara ini kemudian dilimpahkan kewenangannya kepada *Landraad* (Pengadilan Negeri).<sup>8</sup>

Menurut C.S.T Kansil, politik hukum yang dijalankan Belanda di Indonesia kala itu bertujuan untuk mempermudah pembuatan kontrak-kontrak antara pihak kolonial dengan kerajaan-kerajaan di nusantara dan untuk menjamin kepastian hukum bagi orang Belanda itu. Dalam hal ini, kaum Tionghoa pun ditundukkan

---

<sup>7</sup> Suhartono, *Aktualisasi Hukum Islam dalam Masalah Perkawinan dan Kewarisan di Indonesia Suatu Perspektif Sosio Kultural Historis*, Jurnal Mimbar Hukum No. 54 Tahun XII, September - Oktober 2001, Hlm. 55

<sup>8</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, LKiS, Yogyakarta, 2005 Hlm. 53



secara politik kepada Hukum Eropa.<sup>9</sup> Upaya sistemik yang kemudian ditempuh oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai realisasi teori *receptie* ini adalah dengan berusaha melumpuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam dengan cara antara lain:

1. Sama sekali tidak memasukkan masalah *hudud* dan *qishash* dalam bidang hukum pidana. Mengenai hukum pidana ini telah diunifikasi dengan *Wet Boek Van strafrecht* yang mulai berlaku sejak Januari 1919 (*Staatsblad* 1915 No. 732).
2. Di bidang tata negara, ajaran Islam yang mengenai hal tersebut dihancurkan sama sekali. Segala bentuk kajian yang berhubungan dengan politik ketatanegaraan (*siyasa*) dilarang keras.
3. Mempersempit berlakunya hukum *muamalah* yang menyangkut hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Bahkan khusus untuk hukum kewarisan Islam diupayakan tidak berlaku yang ditandai oleh adanya upaya dari pemerintah Hindia Belanda untuk menanggalkan wewenang peradilan agama di bidang kewarisan pada pengadilan agama di Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan, kemudian kewenangan di bidang kewarisan ini diserahkan kepada *landraad*. Di samping itu juga terdapat larangan penyelesaian dengan hukum Islam jika di tempat terjadinya perkara tidak diketahui bagaimana bunyi hukum adatnya.

Kendati demikian, begitu besarnya usaha kolonial menghapus eksistensi hukum Islam, namun itu semua tidak membuat hukum Islam tersebut kehilangan pengaruhnya, setidaknya di beberapa kawasan di Nusantara. Hal ini menunjukkan

---

<sup>9</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hlm. 125

betapa mengakarnya hukum Islam itu di tengah kehidupan rakyat. Suatu contoh yang dicatat oleh sejarah, bahwa pada kerajaan Melayu Lingga–Riau (pelanjut kerajaan Riau-Johor yang merupakan pewaris dari kerajaan Melaka) pada abad ke-19, hukum syariah menjadi dasar praktik penyelenggaraan negara (kerajaan). Yamtuan Muda Haji Abdullah (w.1858) sebagai Yamtuan Muda Lingga-Riau ke-9, ketika akan mengadakan acara pelantikan Sultan Sulaiman pada tahun 1857 memerintahkan kepada Ali Haji (1809-1873) -penyusun Gurindam Duabelas- agar pelantikan dilakukan sesuai dengan syariah Islam. Ali Haji sendiri, dalam kapasitasnya sebagai ahl al-hall wa al-`aqd dalam kata pelantikannya mengatakan: “..Patik semua harapkan Duli Tuanku mengikuti titah Allah Ta’ala serta Rasul- Nya...”. Dalam bukunya yang ditulis beberapa waktu sebelumnya sebagai pedoman penyelenggaraan kerajaan , ketika ia menjadi penanggung jawab tertinggi hukum (semacam Menteri Hukum) di kerajaan tersebut, Ali Haji menegaskan bahwa hukum yang diberlakukan terhadap rakyat kerajaan adalah hukum yang terpakai di dalam agama Islam, yaitu hukum syariah yang bersumber kepada al-Qur’an dan Hadits.

Pada perkembangan selanjutnya, sejak diproklamasikannya kemerdekaan oleh Sukarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa ini (*founding fathers*) mulai terlibat perbedaan pendapat soal hukum yang akan berlaku untuk rakyat di negara ini. Secara umum, dua kubu kemudian muncul dalam menyikapi problem ini; kubu Nasionalis dan Religius Islamis. Kubu Nasionalis menghendaki agar negara membangun hukum yang terlepas dari intervensi agama, dalam arti

bahwa negara tidak berhak mengatur masyarakat dalam mengamalkan ajaran agama mereka. Pendek kata, agama harus dipisahkan dari dan dengan negara. Sedangkan Kubu Religius (Islam) menghendaki agar negara turut serta membangun masyarakat yang patuh dan taat menjalankan ajaran agama. Keikutsertaan pemerintah itu diwujudkan dalam konstitusi dan regulasi-regulasi yang dibuat negara. Artinya, hukum Islam harus dipositivisasi melalui lembaga undang-undang serta perangkat peraturan lainnya. Dengan demikian diharapkan hukum Islam diharapkan tidak hanya sekedar sebagai suatu hukum yang dicita-citakan (*Ius constituendum*), namun menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia (*Ius constitutum*).

Para pendiri bangsa ini pada awalnya menyadari tentang urgensi penerapan hukum Islam di Indonesia, hal ini mengingat bahwa mayoritas penduduk negara kepulauan ini beragama Islam. Karena itu, lahirlah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Namun pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah Piagam Jakarta diadopsi menjadi Pembukaan UUD 1945, tujuh kata terakhir dalam kalimat tersebut dihilangkan meskipun sehari sebelumnya telah disepakati. Tujuh kata yang dimaksud adalah kalimat: “*Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*”. Dengan penghapusan ini, sila pertama Pancasila menjadi berbunyi sebagai berikut: “*Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Menurut Ahmad Sukardja, kalimat ini merupakan *kalimatin sawâ'in* (kata yang sama/sepakat) yang secara politis menjadi titik temu sekaligus disepakati oleh golongan Islam dan Kristen dalam merumuskan UUD 1945 yang selanjutnya diterima oleh golongan-golongan lain.

Dalam ungkapan sebuah partai politik berhaluan Islam pada sidang tahunan MPR 2000: “*Tanggal 17 Agustus 1945 umat Islam bersyukur, tapi tanggal 18 Agustus umat Islam beristighfar*”.<sup>10</sup>

Bagi tokoh-tokoh Islam politik, terhapusnya tujuh kata yang telah melewati proses musyawarah dan *bargaining* yang alot tersebut dapat diterjemahkan sebagai kegagalan pertama dalam usaha positivisasi hukum Islam.<sup>11</sup>

Peristiwa ini dimaknai sebagai rangkaian awal pemisahan antara Negara dan Agama. Karenanya, agenda perjuangan untuk menegakkan hal ini terus berlangsung dalam masa-masa kepemimpinan pasca kemerdekaan, baik dalam masa Orde Lama maupun Orde Baru meskipun dengan jalan yang tersendat-sendat dan terselubung. Seiring perjalanan waktu, upaya untuk mengembalikan tujuh kata yang dianggap sebagai *legal basic* untuk mempositivisasi Hukum Islam tidak terhenti. Pada masa Orde Lama, dalam sidang Konstituante hasil Pemilihan Umum tahun 1955, tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut kembali diperjuangkan untuk diformalisasi. Namun upaya tersebut kandas ketika Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 untuk kembali kepada UUD 1945. Walau begitu, dalam konsiderans Dekrit tersebut dinyatakan oleh Presiden: *Kami berkeyakinan, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut*”. Menurut hukum tata negara Indonesia –sebagaimana yang dikutip dari Ismail Sunny-, konsideran atau

---

<sup>10</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, h. 64

<sup>11</sup> Ahmad Kurdi Moekri, *Negara Hukum Dalam Ujian*, Ka-tulis-tiwa Press, Jakarta, 2007, h. 23

*preamble*, dan bahkan penjelasan peraturan perundang-undangan mempunyai kedudukan hukum. 43 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa negara pada dasarnya masih mengakui bahwa hukum Islam masih satu kesatuan dalam tatanan hukum nasional dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Inilah politik hukum yang dijalankan penguasa untuk meredam gejolak politik rakyat saat itu, terutama di saat maraknya gerakan-gerakan disintegrasi semisal DI/TII di Aceh, Makassar dan beberapa daerah lainnya pada waktu itu.<sup>12</sup>

Beberapa catatan penting lainnya pada masa Orde Lama yang merupakan bias dari upaya positivisasi hukum Islam, di antaranya adalah berdirinya lembaga Departemen Agama yang didirikan pada 3 Januari 1946, lembaga-lembaga pendidikan Islam, serta Majelis Ulama Indonesia tahun 1962. Pada masa Orde Baru, orientasi positivisasi hukum Islam mulai berubah. Perjuangan untuk mewujudkan hukum Islam di Indonesia yang semula dipandang sebagai suatu perjuangan untuk memproklamasikan suatu negara Islam secara formal berubah menjadi “*perjuangan kultural*” dari bawah, yakni dengan berusaha keras melakukan penerapan praktis dari hukum Islam. Dalam perkembangannya, perjuangan untuk mengangkat unsur-unsur hukum Islam dalam hukum nasional tetap dilakukan oleh kelompok masyarakat muslim. Adapun bidang-bidang hukum Islam yang diperjuangkan waktu itu yakni hukum perkawinan, hukum kewarisan, hibah, wakaf, dan hukum zakat. Di antara bidang-bidang hukum yang diperjuangkan itu hanya bidang hukum perkawinan yang

---

<sup>12</sup> Ismail Sunny, et. al, *Hukum Islam di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, h. 77

dapat dikatakan berhasil dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diikuti pula setelah itu dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menandakan hukum Islam telah mendapat tempat tersendiri dalam Negara Republik Indonesia. Kelahiran Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 semakin membuka ruang bagi positivisasi hukum Islam tersebut. Kompilasi ini lahir di penghujung masa kepemimpinan Orde Baru, di mana kekuasaan Suharto sudah mulai goyah. Di masa-masa penghujung tersebut, pemerintah menampilkan sikap yang lunak terhadap kelompok-kelompok Islam. Hal ini ditandai pula dengan lahirnya ICMI, diizinkan Bank Muamalat berdiri dan beroperasi, dan lain sebagainya. Karena itu, secara gamblang dapat disimpulkan bahwa politik hukum yang dijalankan Orde Baru di penghujung kekuasaannya dengan menunjukkan sikap lunak ini salah satu tujuannya adalah untuk mempertahankan kekuasaan.

Terlepas dari hal di atas, meski ideologisasi syariat Islam secara politis dianggap gagal total, namun dari aspek yuridis-sosiologis upaya tersebut terus berproses melalui perjuangan formalisasi syariat Islam menjadi hukum nasional dan atau ke dalam hukum nasional. Diakui, bahwa formalisasi syariat Islam menjadi hukum nasional atau ke dalam hukum nasional memang menghadapi kendala dan permasalahan yang sangat mendasar. Selain beragamnya agama, juga terdapat

berbagai sumber hukum nasional yang sudah mapan sehingga sulit melakukan kodifikasi atau unifikasi hukum. Hingga masa awal reformasi, syariat Islam yang menjadi hukum positif sudah memasuki bidang *'ubûdiyyah* yaitu Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Di bidang *mu'âmalah* hukum privat dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Sedangkan di bidang *jinayah* (hukum pidana Islam) masih dalam bentuk wacana sosialisasi dan internalisasi di masyarakat. Kondisi hukum pidana Islam di Indonesia dalam teori ilmu hukum merupakan hukum yang masih dicita-citakan (*ius constituendum*). Perjuangan itu perlu diteruskan dengan berbagai upaya sehingga hukum pidana Islam menjadi hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia, apakah dalam bentuk kodifikasi, unifikasi, atau mungkin kompilasi hukum.

#### ***B. Latar Belakang dan proses lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.***

Kecenderungan masyarakat Indonesia di era reformasi menunjukkan bahwa mayoritas muslim ingin semakin menegaskan diri dalam arti kekuasaan politik serta aspirasi pembentukan dan penerapan hukum yang didasarkan dan bersumber pada norma-norma dan nilai-nilai hukum Islam. Indikator yang mencerminkan kecenderungan tersebut dapat dilihat dari lahirnya peraturan perundang-undangan yang dalam ketentuan-ketentuannya menyerap jiwa dan prinsip-prinsip hukum Islam serta melindungi kepentingan umat Islam. Bahkan, saat ini telah dicanangkan gerakan *Daarut Taqnin* sebagai bentuk periode baru dari Hukum Islam yang mengharuskan



Hukum Islam mendapat porsi yang besar untuk kepentingan nasional dalam kesatuan Republik Indonesia.<sup>13</sup>

Kondisi ini tak terlepas dari perkembangan hukum Islam yang tak saja berkembang di segi akademis, tapi juga dari segi praktis. Salah satunya dapat dilihat dari praktek ekonomi Islam yang saat ini sudah menjadi fenomena menarik yang mendapat perhatian dari pemikir ekonomi di seluruh belahan dunia.

Indonesia mengenal perekonomian syariah pertama kali pada awal era 90-an, yakni ditandai dengan lahirnya instrumen perbankan syari'ah dengan label Bank Muamalat sebagai Bank Islam pertama di tanah air. Eksistensi Bank Muamalat yang semakin prospektif di kancah perekonomian nasional terutama setelah terbukti Bank Muamalat tahan terhadap krisis sekitar tahun 1998 membuat keberadaan Bank Islam dan Lembaga-lembaga Keuangan Syariah lainnya berkembang secara signifikan. Sebagai konsekuensi dari perkembangannya, institusi perekonomian Islam tersebut tentu saja akan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang muncul akibat tarik menarik antar kepentingan para pihak dalam persoalan ekonomi, sementara hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terhadap permasalahan itu.

Sejak tahun 1994, keberadaan Badan Arbitrase Syari'ah (Basyarnas) menjadi satu-satunya mediator tempat menyelesaikan persengketaan antara para pihak dalam

---

<sup>13</sup> Chuzaimah Batubara, *Politik Hukum Islam Masa Reformasi*, dalam Jurnal Mimbar Hukum No. 68

hal ekonomi syari'ah. Namun, peran dan fungsi Badan Arbitrase ini tidak optimal dan tidak memadai untuk menyelesaikan setiap kasus perselisihan, sebab karena lembaga arbitrase tidak memiliki daya paksa untuk menyeret orang yang digugat ke Pengadilan, sehingga tidak mengherankan jika ratusan bahkan mungkin ribuan kasus gugatan perselisihan di bidang ekonom syariah yang tercecer karena berada di luar kewenangan Badan Arbitrase Syariah. Banyaknya kasus gugatan di bidang ekonomi syari'ah yang tidak bisa diselesaikan Badan Arbitrase Syari'ah, karena Badan Arbitrase bukanlah lembaga Pengadilan.

Karena kedudukan arbitrase adalah lembaga *tahkim*, maka keputusan arbitrase baru memiliki kekuatan hukum, apabila kedua belah pihak sepakat membawa kasus itu ke Badan Arbitrase Syariah dan mereka sepakat untuk menerima keputusan badan arbitrase tersebut. Yang menjadi masalah adalah gugatan keberatan sering kali berasal dari satu pihak. Misalnya dalam sengketa perbankan syariah, gugatan sering kali berasal dari nasabah yang dirugikan. Sementara, pihak perbankan syari'ah yang digugat, tidak serta-merta mau masalah itu dibawa ke lembaga arbitrase, karena hal itu bisa menjadi beban dan menimbulkan kewajiban pembayaran bagi bank syariah. Akibatnya, dalam banyak kasus, persolan sengketa yang merugikan nasabah, terkatung-katung tiada ujungnya, karena masalah itu tidak bisa diselesaikan badan arbitrase akibat salah satu pihak tidak mau membawanya ke Badan Arbitrase tersebut.

Pranata hukum yang sepertinya cukup memiliki fondasi kuat baru terbatas pada Peraturan Bank Indonesia (BI) yang merujuk pada fatwa Dewan Syari'ah

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun, seperti yang diketahui bahwa fatwa itu sendiri juga hanya merupakan sebuah pendapat, bukan hukum yang mengikat. Upaya positivisasi hukum ekonomi syari'ah mulai terarah setelah direvisinya UU Nomor 7 tahun 1989 menjadi UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam pertimbangan amandemen Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam undang-undang yang baru tersebut, kewenangan Pengadilan Agama diperluas sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, Pengadilan Agama tidak lagi hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi syari'ah. Kaitannya dengan wewenang baru PA ini, Pasal 49 UU Pengadilan Agama diubah menjadi berbunyi:

*"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

- a. Perkawinan;*
- b. Waris;*

- c. *Wasiat;*
- d. *Hibah;*
- e. *Wakaf;*
- f. *Zakat;*
- g. *Infraq;*
- h. *Shadaqah; dan*
- i. *Ekonomi syari'ah;*

Penjelasan untuk huruf i. *Ekonomi syari'ah;* dijabarkan dalam penjelasan atas undang-undang tersebut yang menyatakan:

*"Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:*

- a. *Bank syari'ah;*
- b. *Lembaga keuangan mikro syari'ah;*
- c. *Asuransi syari'ah;*
- d. *Reasuransi syari'ah;*
- e. *Reksadana syari'ah;*
- f. *Obligasi dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;*
- g. *Sekuritas syari'ah;*
- h. *Pembiayaan syari'ah;*
- i. *Pegadaian syari'ah;*
- j. *Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan*

k. *Bisnis syari'ah.*

Konsekuensi dari perluasan kewenangan tersebut, para penegak hukum yang ada di Peradilan Agama dituntut untuk mempersiapkan diri dan meningkatkan kapabilitasnya sebagai pemberi keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam materi-materi baru yang diamanatkan Undang-Undang tersebut, utamanya perihal ekonomi syari'ah.<sup>14</sup>

Dalam rangka merealisasikan kewenangan baru Peradilan Agama tersebut, Mahkamah Agung telah menetapkan beberapa kebijakan, antara lain:

*Pertama*, memperbaiki sarana dan prasarana lembaga Peradilan Agama, baik hal-hal yang menyangkut fisik gedung maupun hal-hal yang menyangkut peralatan.

*Kedua*, meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia (SDM) Peradilan Agama dengan mengadakan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mendidik para aparat Peradilan Agama, terutama para Hakim, dalam bidang ekonomi syariah.

*Ketiga*, membentuk hukum formil dan materil agar menjadi pedoman bagi aparat Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ekonomi syariah.

*Keempat*, membenahi sistem dan prosedur agar perkara yang menyangkut ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah dan biaya ringan.

---

<sup>14</sup> Abdul Mughits, *Kompilasi hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Al-Mawarid, Edisi XVIII Tahun 2008, h. 143

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, Mahkamah Agung meresponsnya dengan merancang suatu kompilasi hukum yang disebut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mahkamah Agung menilai bahwa keberadaan KHES ini memang sangat diperlukan sebagai pegangan dan rujukan hakim Peradilan Agama dalam memutuskan sengketa ekonomi syari'ah. Guna merealisasikan rancangan tersebut, Ketua Mahkamah Agung (pada waktu itu dijabat oleh Bagir Manan) membentuk Tim Penyusunan KHES berdasarkan surat keputusan Nomor: KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum. Tugas dari Tim tersebut secara umum adalah menghimpun dan mengolah bahan (materi) yang diperlukan, menyusun draf naskah, menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draf naskah tersebut dengan lembaga, ulama dan para pakar, menyempurnakan naskah, dan melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Begitu dibentuk, Tim ini langsung bekerja dan mengambil langkah- langkah nyata dan menempuh beberapa tahapan realisasi, di antaranya adalah:

1. Menyesuaikan pola pikir (*united legal opinion*) dalam bentuk seminar ekonomi syari'ah di Hotel Sahid Kusuma Solo pada tanggal 21 s/d 23 April 2006, dan di Hotel Sahid Yogyakarta pada tanggal 4 s/d 6 Juni 2006. Pembicara dalam dua seminar tersebut adalah para pakar ekonomi syariah, baik dari perguruan tinggi, Dewan Syariah Nasional/MUI, Basyarnas, para praktisi perbankan syariah (Bank Muamalat) serta para hakim dari lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan

Agama.

2. Mencari format yang ideal (*united legal frame work*) dalam bentuk pertemuan dengan pihak Bank Indonesia (BI) dalam rangka mencari masukan tentang segala hal yang berlaku pada BI terhadap ekonomi syariah dan sejauh mana pembinaan yang telah dilakukan oleh BI terhadap perbankan syariah. Acara tersebut dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 7 Juni 2006. Selain itu juga telah dilaksanakan Semiloka tentang ekonomi syariah di Hotel Grand Alia Cikini Jakarta tanggal 20 November 2006. Pembicara dalam acara tersebut adalah para pakar ekonomi syariah dari BI, Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah (PKES), MUI, Ikatan Para Ahli Ekonomi Syariah dan para praktisi hukum.
3. Melaksanakan kajian pustaka (*library research*) yang disesuaikan dengan pembagian empat kelompok di atas. Untuk melengkapi referensi, Tim KHES telah melakukan studi banding ke Pusat Kajian Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Kuala Lumpur, Pusat Takaful Malaysia di Kuala Lumpur, Lembaga Keuangan Islam dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan di Kuala Lumpur pada tanggal 16 s/d 20 November 2006. Studi banding juga dilaksanakan ke Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Islamabad, *Shariah Court* Pakistan, Mizan Bank Islamabad Pakistan, Bank Islam Pakistan dan beberapa lembaga keuangan syari'ah di Pakistan. Kunjungan ini dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 27 Juni 2007.
4. Tahap pengolahan dan analisis bahan dan data-data yang sudah terkumpul. Draf



KHES yang disusun dalam tahap pertama sebanyak 1015 pasal dilaksanakan selama empat bulan. Kemudian diadakan pembahasan dan diskusi tentang isi materi draf KHES tersebut.<sup>15</sup>

Selanjutnya, untuk pembahasan materi dan isi draf KHES tersebut, Tim Penyusun telah dilaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya yaitu:

1. Diskusi pertama pada tanggal 14 s/d 16 Juni 2007 di Hotel Yasmin Cianjur Bogor. Hasil dalam diskusi tersebut adalah kesepakatan untuk penyempurnaan draf terutama dalam sistematika, metodologi, dan beberapa materi yang belum masuk.
2. Pertemuan dengan para konsultan pada tanggal 27 s/d 28 Juli 2007 di Hotel Pangihegar Bandung. Hasil dalam pertemuan ini adalah kesepakatan bahwa dari segi sistematika dan metodologi KHES sudah memadai, tetapi dari segi substansi perlu disempurnakan lagi, terutama yang berhubungan dengan wanprestasi (cidera janji), perbuatan melawan hukum, ganti rugi dan *overmacht*. Selain itu, hal-hal yang menyangkut sanksi dan pidana supaya dihapus karena pengaturan tentang hal tersebut menjadi kewenangan legislatif.

---

<sup>15</sup> Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Al-Mawarid, Edisi XVIII Tahun 2008, h. 144

3. Finalisasi dalam satu bulan berikutnya sejak pertemuan di atas. Hasil final dari semua pembahasan tersebut, akhirnya KHES hanya memuat 845 pasal (dari sebelumnya yang memuat 1015 pasal) dengan format lebih ramping tetapi lebih 'berisi'.

Selanjutnya, pada tanggal 16 s/d 17 Juli 2007, Tim kembali mengadakan pertemuan di Serang untuk merampungkan segala sesuatu yang berhubungan dengan finalisasi KHES tersebut. Dalam pertemuan ini, Tim sepakat bahwa draf yang telah disepakati akan segera disosialisasikan di 4 (empat) tempat, yaitu Banda Aceh, Makassar, Banjarmasin dan Jakarta.

Berikutnya, pada tanggal 26 s/d 28 Maret 2008, Tim Penyusun kembali mengadakan pertemuan dengan para konsultan dan beberapa pakar hukum Islam di Bandung. Selain membahas kembali tentang klausul perbuatan melawan hukum, wanprestasi, *overmacht* dan sebagainya, pertemuan kali ini juga disusun daftar isian masalah untuk dikaji lebih lanjut dengan merujuk kepada literatur-literatur yang aktual dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada tanggal 10 Juni 2008, Tim Penyusun kembali mengadakan pertemuan di Wisma Haji Jalan Jaksa di Jakarta bersama beberapa konsultan guna mengecek kembali pasal-pasal yang dianggap masih tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, lalu menyusunnya kembali dengan tata bahasa Indonesia yang baik. Dari serangkaian proses ini, KHES kemudian disepakati menjadi 796 pasal.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang sudah final selanjutnya

dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan agar KHES tersebut dapat dijadikan pedoman oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, Ketua Mahkamah Agung RI kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian, peluncuran pertama PERMA tersebut dilaksanakan pada saat acara Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Mahkamah Agung RI dengan para Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh lingkungan peradilan seluruh Indonesia di Jakarta pada bulan Agustus 2008. Dengan peluncuran PERMA tersebut, maka resmilah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjadi pedoman bagi para Hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara sengketa Ekonomi Syariah.

Meski disambut antusias, namun atas isi KHES yang diluncurkan tersebut, banyak masukan perbaikan dari para Hakim Peradilan Agama, baik yang menyangkut redaksi ataupun substansi. Masukan-masukan tersebut lalu diinventarisasi, lalu dibahas oleh Kelompok Kerja (POKJA) Perdata Agama MARI di Bandung dari tanggal 1s/d 3 Juli 2009. Hasil kajian tersebut kemudian dirumuskan kembali oleh sebuah tim kecil, lalu hasilnya disampaikan kepada Ketua POKJA Perdata Agama MARI yang sekaligus mengetuai Tim Penyusunan KHES, yaitu Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum. Setelah dikoreksi dan disetujui, maka lahirlah Buku KHES Edisi Revisi<sup>54</sup> yang terdiri dari 790 pasal yang kemudian diedarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2010.

Bila dibandingkan antara KHES edisi revisi 2010 dengan edisi awal<sup>55</sup>, ada beberapa perbedaan di antara kedua kompilasi tersebut, antara lain:

1. KHES awal terdiri dari 796 pasal, sedangkan KHES Edisi Revisi terdiri 790 pasal, artinya KHES edisi revisi dikurangi sebanyak 6 pasal.
2. Beberapa bab dari Buku II direposisi dari tata susun sebelumnya. Misalnya bab VII tentang *syirkah milk* sebelumnya merupakan bab XVI. Reposisi ini juga turut mengubah posisi bab-bab lainnya.
3. Bunyi pasal terakhir (pasal 790) dari KHES edisi revisi adalah: “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar”, yang merupakan ketentuan umum tambahan yang tidak ada dalam KHES awal.

Perlu diperhatikan juga, bahwa dalam buku KHES Edisi Revisi 2010 yang diterbitkan oleh Dirjen Badilag tersebut, ditemukan sedikit kejanggalan, misalnya adanya pasal yang diulang dalam Buku I, seperti yang terdapat dalam pasal 48 dan 49 yang berbunyi (Halaman 23 dan 24):

*Pasal 48 : Pelaksanaan akad atau hasil akhir akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad, bukan hanya pada kata dan kalimat.*

*Pasal 49: (1) Pada prinsipnya akad harus diartikan dengan pengertian aslinya bukan dengan pengertian kiasannya. (2) Apabila teks suatu akad sudah jelas, maka tidak perlu ada penafsiran.*

Bunyi kedua pasal tersebut diulang kembali dengan kalimat yang sama dalam 2 pasal berikutnya, yaitu pasal 50 dan 51 (halaman 24). Jadi, pasal 50 dan 51 di

dalam buku berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 50: Pelaksanaan akad atau hasil akhir akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad, bukan hanya pada kata dan kalimat.*

*Pasal 51: (1) Pada prinsipnya akad harus diartikan dengan pengertian aslinya bukan dengan pengertian kiasannya. (2) Apabila teks suatu akad sudah jelas, maka tidak perlu ada penafsiran.*

Sedangkan, dalam *softcopy* KHES edisi awal yang diedarkan di situs [www.badilag.net](http://www.badilag.net), pasal 50 dan 51 KHES berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 50: Melaksanakan suatu kalimat dalam akad lebih diutamakan daripada tidak melaksanakan kalimat tersebut.*

*Pasal 51: Apabila arti tersurat tidak dapat diterapkan, maka dapat digunakan makna yang tersirat.*

Menurut anggapan penulis, pengulangan yang terdapat di KHES edisi revisi tersebut merupakan kesalahan cetak belaka. Karenanya, pasal 50 dan 51 KHES edisi awal dinilai lebih akurat. Dilihat dari konten atau kandungan isi dalam KHES, penulis menilai bahwa penyusun KHES banyak mengadopsi aturan-aturan hukum mu'amalat dalam mazhab Hanafi, terutama yang telah dimodifikasi dalam *Majallah al-Ahkâm al-'Adliyyah* dan *Mursyid al-Hayrân*. Sedangkan kitab fiqh yang menjadi rujukan utama dalam penyusunan KHES ini di antaranya adalah kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu* karangan Dr. Wahbah al-Zuhaili yang referensinya juga banyak merujuk kepada kitab-kitab ulama mazhab Hanafi seperti *Badâ'i al-Shanâ'i* karangan 'Alâ al-Dîn al-Kâsânî (mazhab Hanafi) dan lain sebagainya. Selain itu, kandungan<sup>44</sup> pasal-pasal dalam KHES yang tidak

bertumpu pada satu mazhab tertentu merupakan suatu hal yang patut diapresiasi. Sebab, kompilasi hukum seperti inilah yang menjadi kodifikasi hukum harapan. Sebagaimana disebutkan oleh Yusuf al-Qaradhawi, bahwa dalam rangka penerapan syariat Islam di berbagai lapangan kehidupan, maka diperlukan posisitivisasi hukum Islam yang modern yang tidak lagi bertumpu pada fanatisme terhadap mazhab tertentu.<sup>16</sup>

### C. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Positif di Indonesia

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa KHES lahir guna merespons perkembangan kewenangan Peradilan Agama yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (yang sekarang telah diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), khususnya kewenangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Respons tersebut kemudian direalisasikan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 yang isinya memerintahkan kepada para Hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk menjadikan KHES sebagai pedoman dalam memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Jadi, kekuatan hukum dari KHES sampai hari ini barulah sebatas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Dalam tata perundang-undangan di Indonesia, Mahkamah Agung memang diberikan delegasi kewenangan oleh undang-undang untuk menerbitkan suatu peraturan yang berfungsi sebagai pengisi

---

<sup>16</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirâsah al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Maktabah Wahbah, Kairo,

kekosongan ataupun pelengkap kekurangan aturan terhadap hukum acara demi memperlancar penyelenggaraan peradilan. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1954 (berdasarkan delegasi kewenangan yang diberikan oleh Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia), peraturan yang diperoleh berdasarkan delegasi kewenangan itu dinamakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Secara historis, delegasi kewenangan yang diberikan oleh lembaga legislatif kepada Mahkamah Agung tersebut bertujuan untuk mengisi kekosongan ataupun melengkapi kekurangan hukum acara peradilan yang terdapat di dalam undang-undang, karena pada awal kemerdekaan Indonesia belum memiliki ketentuan hukum acara yang dapat mengadaptasi perkembangan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa sesungguhnya kewenangan *regeling* yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah bersifat sementara. Namun dalam perkembangannya, kewenangan mengatur oleh Mahkamah Agung masih tetap dipertahankan, bahkan dilegitimasi melalui beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah.

Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Namun kemudian, pada ayat (4) pasal di atas dinyatakan pula bahwa jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (4) ini, disebutkan bahwa jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini antara lain adalah: peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah mendapatkan legitimasi sebagai sebuah peraturan perundangan di Indonesia dan dapat dijadikan rujukan atau payung hukum dalam mengadili serta menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.



### BAB III

## KONSEP WARALABA DAN KEADILAN DALAM ISLAM

### ***A. Konsep Waralaba***

#### **1. Pengertian Bisnis Waralaba**

Secara bebas dan sederhana, waralaba didefinisikan sebagai hak istimewa (*privilege*) yang terjamin dan atau diberikan oleh pemberi waralaba (*franchisor*) kepada penerima waralaba (*franchisee*) dengan sejumlah kewajiban atau pembayaran. Dalam format bisnis, pengertian waralaba adalah pengaturan bisnis dengan system pemberian hak pemakaian nama dagang oleh *franchisor* kepada pihak independen atau franchisee untuk menjual produk atau jasa sesuai dengan kesepakatan.<sup>1</sup>

Franchise sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *francorum rex* yang artinya “bebas dari ikatan”, yang mengacu pada kebebasan untuk memiliki hak usaha. Sedangkan pengertian *franchise* berasal dari bahasa perancis abad pertengahan, diambil dari kata “*franc*” (bebas) atau “*francher*” (membebaskan) yang secara umum diartikan sebagai pemberian hak istimewa. Oleh sebab itu pengertian *franchise* diinterpretasikan sebagai pembebasan dari pembatasan tertentu atau kemungkinan untuk melaksanakan tindakan tertentu, yang untuk orang lain dilarang.

Menurut Dr Martin mendelsonh, pakar waralaba asal Amerika Serikat, format bisnis *franchise* adalah modal izin dari satu orang (*franchisor*) kepada orang

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h. 6

lain (*franchisee*) yang memberikan haknya (dan biasanya mempersyaratkan). *Franchisee* mengadakan bisnis dibawah nama dagang *franchisor*, meliputi seluruh elemen yang dibutuhkan untuk membuat orang yang sebelumnya belum terlatih dalam berbisnis yang dikembangkan / dibangun oleh *franchisor* dibawah brand miliknya, dan setelah *training* untuk menjalankannya berdasarkan pada basis yang ditentukan sebelumnya dengan pendampingan yang berkelanjutan. Amir Karamoy mengatakan bahwa secara hukum waralaba berarti persetujuan legal atas pemberian hak atau keistimewaan untuk memasarkan suatu produk / jasa dari pemilik (waralaba) kepada pihak lain terwaralaba yang diatur dalam suatu perjanjian tertentu.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Asosiasi *Franchise* Indonesia, yang dimaksud dengan Waralaba ialah Suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, dimana pemilik merek (*franchisor*) memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu.<sup>3</sup>

Waralaba di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997 tentang WARALABA yang kemudian diganti dengan peraturan pemerintah no42 tahun 2007 tentang WARALABA, dan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba yang diperkuat dengan peraturan

---

<sup>2</sup> Lukman Hakim, *Info Lengkap Waralaba* (Jakarta: PT.Buku Kita, 2008 cet 1). h.13-17

<sup>3</sup> Wikipedia, Artikel diakses pada 9 November 2015 dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Waralaba>

menteri perdagangan Nomor 12/M-Dag/Per/3/2006.<sup>4</sup> Dalam PP tersebut ditegaskan bahwa “waralaba” (*franchise*) adalah perikatan antara pembeli waralaba dengan penerima waralaba, dimana penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pembeli waralaba dengan sejumlah kewajiban menggunakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Dalam peraturan ini juga dijelaskan bahwa pemberi waralaba (*franchisor*) adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba. Sedangkan penerima waralaba (*franchisee*) adalah badan usaha atau perseorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba.<sup>5</sup>

## 2. *Franchise fee*

Terkait dengan biaya biaya yang timbul dalam bisnis waralaba, umumnya seorang terwaralaba berkewajiban menanggung berbagai macam biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian waralaba seperti *franchise fee*. *Franchise fee* adalah

<sup>4</sup> Gunawan Widjaja, *Waralaba*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h. 147

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h. 12

jumlah yang harus dibayar sebagai imbalan atas pemberian hak intelektual pemberi waralaba, yang dibayar untuk satu kali ( *one time fee* ), yaitu pada saat bisnis waralaba akan dimulai atau pada saat penandatanganan akta perjanjian waralaba. Nilai *franchisee fee* ini sangat bergantung pada jenis waralaba. Semakin terkenal suatu waralaba semakin mahal *franchisee fee* yang harus dibayarkan.

Menurut *International Franchise Association Fee* untuk memulai sebuah waralaba bisa serendah \$ 8000 atau bahkan setinggi \$5 juta. Sedangkan *franchise fee* waralaba lokal berkisar antara 10-400 juta rupiah. Biaya ini biasanya mencakup *initial fee*, renovasi, *supply*, dan *inventory*, deposit, biaya sebelum memulai bisnis, biaya pelatihan dan modal kerja. Biaya lain yang akan muncul adalah *royalty fee* yang besarnya antara 2-15% dari penjualan.<sup>6</sup>

Pembayaran *franchisee fee* jumlah dan jangka waktunya dicantumkan di dalam perjanjian. Pembayaran yang telah diserahkan sepenuhnya menjadi milik pewaralaba dan tidak dapat dikembalikan kecuali disebutkan dalam perjanjian. *franchisee fee* diperlukan oleh pewaralaba untuk membantu terwaralaba untuk operasional usaha waralaba. *Franchise fee* diperlukan *franchisor* untuk membantu franchisee dan terdiri dari:

- a. Bantuan pra-operasi dan awal operasi bisnis terwaralaba.
- b. Pembuatan manual operasi untuk digunakan terwaralaba.

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h. 63

- c. Penyelenggaraan pelatihan awal (initial training ) dan biaya konsultasi, khususnya pada operasi bisnis waralaba.
- d. Biaya promosi/iklan, khususnya untuk promosi menjelang pembukaan perusahaan (grand opening terwaralaba).
- e. Survey pemilikan/seleksi lokasi.<sup>7</sup>

Pemberian waralaba senantiasa dikaitkan dengan suatu bentuk imbalan tertentu. Secara umum dikenal dua macam kompensasi yang dapat diminta oleh *franchisor* dari *franchisee* yaitu sebagai berikut:

1) Kompensasi langsung dalam bentuk moneter (*direct monetary compensation*).

Berikut ini adalah kompensasi yang termasuk kompensasi langsung dalam bentuk moneter:

- a. *Lump-sum payment*. Suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*precalculated amount*) yang wajib dibayarkan oleh *franchisee* untuk diberikan kepada *franchisor* pada saat persetujuan waralaba disepakati.
- b. *Royalty*, pembayaran oleh pihak *franchisee* kepada pihak *franchisor* sebagai imbalan, yang besarnya dihitung dari jumlah produksi dan/atau penjualan barang atau jasa berdasarkan perjanjian waralaba, baik yang disertai dengan jumlah minimum atau maksimum atau tidak.

2) Kompensasi tidak langsung dalam bentuk nilai moneter (*indirect moneter compensation*) yang meliputi sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Darmawan Budi Suseno, *Waralaba Syariah* , (Yogyakarta: CAKRAWALA, Cet pertama,2008), h. 56

- a. Keuntungan dari penjualan barang modal atau bahan mentah setengah jadi, dan termasuk barang jadi yang merupakan satu paket dengan pemberian waralaba (*exclusive purchase arrangement*)
- b. Pembayaran dalam bentuk dividen atau bunga pinjaman dimana franchisor memberikan bantuan *financial* baik dalam bentuk ekuitas (*equity participation*) atau dalam bentuk pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. *Cost shifting* atau pengalihan atas sebagian biaya yang harus dikeluarkan oleh franchisor. Pengalihan ini biasanya dilakukan dalam bentuk kewajiban franchisee untuk mengeluarkan semua biaya yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran maupun untuk mempertahankan perlindungan atas hak kekayaan intelektual paket yang diwaralabakan kepadanya.

Dari berbagai macam kompensasi yang telah dijelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1997, kompensasi yang diizinkan dalam pemberian waralaba ialah dalam bentuk kompensasi langsung dalam bentuk moneter.<sup>8</sup>

### 3. **Royalty Fee**

Adalah jumlah uang yang dibayarkan secara periodik oleh terwaralaba kepada pewaralaba sebagai imbalan dari pemakaian hak waralaba oleh terwaralaba yang merupakan persentasi dari omset penjualan terwaralaba . sama seperti *franchise fee*, nilai *royalty fee* ini sangat bervariasi, tergantung pada jenis waralaba. *Royalty fee* yang ditarik oleh pewaralaba secara rutin diperlukan untuk membiayai pemberian

---

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h. 31

bantuan teknik selama kedua belah pihak terikat dalam perjanjian. Biaya royalty dihitung dari persentase omset yang didapat setiap bulannya.<sup>9</sup>

Selain *Franchise fee* dan *Royalty fee* ada beberapa biaya yang umumnya ada dalam bisnis waralaba, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Direct expenses*

Merupakan biaya langsung yang harus dikeluarkan oleh terwaralaba sehubungan dengan pengoperasian suatu usaha waralaba, misalnya terhadap biaya pelatihan manajemen dan keterampilan tertentu.

b. *Marketing dan advertising fees*

Sebagian pewaralaba juga memberlakukan *advertising fee* (biaya periklanan) untuk membiayai pos pengeluaran dan belanja iklan dari pewaralaba yang disebarluaskan secara nasional maupun internasional. Besarnya *advertising fee* maksimum 3% dari penjualan.

Biaya ini dikenakan dengan alasan bahwa tujuan dari jaringan waralaba adalah membentuk suatu skala ekonomi yang demikian besar sehingga biaya-biaya per outletnya menjadi sedemikian efisien untuk bersaing dengan usaha sejenis. Mengingat iklan dirasakan manfaatnya oleh seluruh jaringan maka setiap anggota jaringan diminta memberikan kontribusi dalam bentuk *advertising fee*.<sup>10</sup>

c. *Assignment fee*

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h. 73

<sup>10</sup> Hakim, *info lengkap waralaba*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2007) h. 46

Meupakan biaya yang harus dibayar oleh franchisee kepada franchisor jika pihak franchisee mengalihkan bisnisnya kepada pihak lain, termasuk bisnis yang merupakan objek franchisee. Oleh franchisor, biaya tersebut biasanya dimanfaatkan untuk kepentingan penetapan pembuatan perjanjian penyerahan, pelatihan, franchisee baru, dan sebagainya.<sup>11</sup>

### ***B. Manfaat Bisnis Waralaba***

Martin Mendelson dalam *Franchising: Petunjuk Praktis bagi Franchisor dan Franchisee* merumuskan keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian pemberian waralaba. Menurut Mandelson keuntungan-keuntungan bagi pemberi waralaba adalah:

1. Pemberi waralaba akan lebih mudah untuk melakukan eksploitasi wilayah yang belum masuk lingkungan organisasinya.
2. Penerima waralaba akan mengkonsentrasikan diri secara lebih optimum pada bisnis yang diwaralabakan tersebut, oleh karena mereka adalah pemilik bisnis itu sendiri. Penerima waralaba yang berpikiran tajam, bermotivasi kuat dan tajam pengamatannya dalam meminimalkan biaya serta memaksimalkan penjualan memiliki nilai lebih yang jauh lebih banyak daripada yang harus dan dapat diselesaikan oleh seorang manajer yang harus dibayar pemberi waralaba.

---

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h. 73



3. Pemberi waralaba cenderung untuk tidak memiliki asset outlet dagang sendiri. Tanggung jawab bagi asset tersebut diserahkan pada penerima waralaba yang memilikinya.<sup>12</sup>

Sedangkan hal-hal yang merugikan yang mungkin dapat dihadapi oleh pemberi waralaba meliputi antara lain:

1. Beberapa penerima waralaba menganggap dirinya cenderung independen. Seorang penerima waralaba yang memperoleh keberhasilan, usahanya berjalan dengan baik, dan memperoleh pendapatan sesuai yang diharapkannya, cenderung membuatnya berpikir bahwa ia tidak membutuhkan pemberi waralaba lagi. Akan timbul suatu keyakinan pada dirinya bahwa factor keberhasilannya berasal dari inisiatifnya sendiri dalam menjalankan usahanya dengan baik. Sikap seperti ini akan menjadi masalah dan tantangan bagi pemberi waralaba.
2. Pemberi waralaba harus memiliki keyakinan untuk menjamin bahwa standar kualitas barang dan jasa dijaga melalui rantai waralaba. Pemberi waralaba harus dapat menyediakan staf pendukung lapangan yang akan bertindak sebagai penyelia dari standar-standar tersebut serta untuk memberikan bantuan bagi penerima waralaba untuk mengatasi masalah yang mungkin akan dihadapi oleh penerima waralaba.
3. Hindari timbulnya kemungkinan kekuraangpercayaan diantara pemberi waralaba dengan penerima waralaba.

---

<sup>12</sup> Gunawan Widjaja, *Waralaba*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2003) h. 26

4. Pemberi waralaba harus yakin bahwa orang yang telah diseleksi sebagai waralaba sesuai untuk tipe waralaba tertentu dan mempunyai kapasitas untuk menerima tanggung jawab dan tekanan untuk memiliki dan menjalankan bisnisnya sendiri.<sup>13</sup>

Selain itu, Manfaat waralaba banyak sekali, terutama untuk terwaralaba. Karena terwaralaba tidak memerlukan pengetahuan dasar dan pengetahuan khusus. Karena dalam menjalankan usaha waralaba ini, terwaralaba menerima bantuan, seperti pelatihan bagi staf terwaralaba dari perwaralaba, diberikan bantuan pembelian peralatan, bahkan terwaralaba mendapatkan pengetahuan khusus serta pengalaman dari organisasi dan manajemen kantor pusat pewaralaba, walaupun ia tetap mandiri.

### ***C. Royalty Fee dan Franchise fee***

Setiap waralaba memiliki mekanisme pembayaran yang berbeda. Ada pewaralaba yang mengharuskan terwaralaba untuk membayar penuh uang *franchisee fee*, namun ada juga pewaralaba yang mengizinkan terwaralaba untuk membayar *franchisee fee* secara berangsur. Pembayaran *franchisee fee* biasanya dilakukan didepan, dalam arti pembayaran dilakukan setelah penandatanganan perjanjian waralaba antara pewaralaba dan terwaralaba.

*Franchisee fee* ini digunakan oleh pewaralaba sebagai biaya investasi awal, dimana digunakan untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk membuka usaha waralaba tersebut, seperti untuk membeli peralatan masak bagi waralaba yang terkait

---

<sup>13</sup> Gunawan Widjaja, *Waralaba*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2003) h. 28.

dengan usaha *food and beverages*, untuk biaya iklan, bahkan untuk biaya pelatihan yang diberikan pewaralaba terkait dengan usaha yang dijalankannya.

Dalam *franchise* sebagai suatu format bisnis yang dituangkan dalam suatu perjanjian antara *franchisor* sebagai pemilik dari hak intelektual, brand, logo dan sistem operasi dan franchisee sebagai penerima (konsep, sistem, penemuan, proses, metode/cara (HAKI), logo, merk/nama) *royalti fee* wajib dibayarkan oleh *franchisee* kepada *franchisor* sesuai yang diperjanjikan dan dalam hal ini wajib dibayarkan setiap bulan/triwulan, yang diambil dari penjualan dengan tingkat persentase tertentu. Besar *royalti fee* tergantung jenis usaha serta hitung-hitungan dari *franchisor* yang mencakup aspek *feasibility* atau kelayakannya suatu usaha *franchise*.<sup>14</sup>

Selain itu, menurut Anang Sukandar, ketua Asosiasi *Franchise* Indonesia (AFI) besarnya *royalti fee* yang wajar adalah yang seperti di luar negeri, yakni antara 1%-12%. Kalau lebih dari itu sudah tidak wajar. Dan prosentase tersebut harus diambil dari omset kotor bukan profit. Bila dihitung dari profit akan menyusahkan karena profit itu sudah masuk dalam pembukuan sehingga perhitungan harus memperhatikan banyak aspek. Keberadaan *royalti fee* sudah seharusnya dijadikan sumber utama pendapatan *franchisor* demi kelangsungan usahanya, karena bagaimanapun juga *franchisor* membutuhkan dana tersebut untuk membiayai segala

---

<sup>14</sup> Gunawan Widjaja, *Waralaba*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2003) h. 108

pengeluaran untuk men-support usahanya seperti: membayar biaya supervisi, biaya monitoring dan biaya *on going* asistensi secara terus menerus.

Jadi bisa disimpulkan *franchisor* harus bisa membuat untung bukan dari *franchisor* tetapi melalui *franchisee*. Maksudnya adalah *Franchisee* untung maka dia sebagai *franchisor* juga untung. Jadi hubungan *franchisor* dan *franchisee* harus *win-win*, tidak hanya memungut *royalti fee* kemudian dilepas begitu saja. Sebab itu, sudah sewajarnya dalam *franchise* ada *royalti fee*. Dan sebagai usaha *franchise* sudah selayaknya terbuka alias tidak menutup berapa keuntungan yang didapat. Kalau sampai ada yang menutup-nutupi keuntungan namanya bukan *franchise*. Meskipun *royalti fee* sewajarnya ada dan harus ada dalam *franchise* namun penetapannya harus sama untuk setiap *franchisee*. Jadi tidak boleh ada diskriminasi meskipun *franchisor* memiliki *franchisee* di beberapa daerah dan omsetnya berbeda-beda. Misalnya, kalau *franchisor* mematok *royalti fee* 5% maka semua *franchisee* harus membayar 5%.

Karena itu, *franchisee* harus memiliki omset yang memadai.<sup>15</sup>

Setiap waralaba memiliki mekanisme pembagian *royalty fee* tersendiri. Pada umumnya dalam perjanjian waralaba menyebutkan bahwa terwaralaba membayar sejumlah biaya waralaba (*royalty fee*) kepada pewaralaba berdasarkan besarnya penjualan. Isinya antara lain mengenai:

1. Dasar pembayaran biasanya berdasarkan penjualan kotor

---

<sup>15</sup> Anang Sukandar, *Aspek Royalti fee pada franchise*, artikel ini dikutip pada 16 September 2015, dari <http://bisnis2121.com/2008/content/view/192/73/>

2. Tingkat royalty seminimum mungkin, terutama ditempat terwaralaba memperoleh hak atas wilayah tertentu / exclusive territory tanpa persyaratan tingkat kuota terendah
3. Pembayaran secara *periodic* ( mingguan, bulanan, kuartalan, dan sebagainya).
4. Waktu pembayaran (misalnya setiap hari kamis, atau berdasarkan penjualan pada minggu sebelumnya, setiap tanggal sepuluh berdasarkan penjualan pada bulan sebelumnya dan sebagainya).<sup>16</sup>

Sedangkan besarnya *franchisee fee* dan *royalty fee* masing masing memang berbeda. Tidak semua jenis *fee* atau *royalty* disyaratkan oleh pewaralaba. Setiap pewaralaba mempunyai kebijakan sendiri dalam menentukan jenis *fee* atau *royalty fee*. Berikut ini tabel joining fee beberapa perusahaan waralaba:

Nama	<i>Joining fee</i>	<i>Royalty fee</i>
Mc Donald's	\$42.500	8% dari penjualan
CFC	Rp 40-60 juta	7 % dari penjualan
Es Teler 77	Rp 50-100 juta	10 % dari penjualan
5 a Sec	Rp 400-500 /10 thn	

(sumber : <http://www.republika.com>)

Dari beberapa perbandingan tersebut, perlu diperhatikan beberapa hal tentang joining fee atau royalty fee antara lain :

<sup>16</sup> Darmawan Budi Suseno, *Waralaba Syariah* , (Yogyakarta: CAKRAWALA, Cet pertama,2008), h. 57

1. Perlu dipikirkan pajak yang harus dibayar akibat pembayaran *royalty fee* dan *franchise fee*.
2. Perlu dipikirkan jika ada bunga atas keterlambatan pembayaran *fee*, apakah bunga tersebut cukup masuk akal (*reasonable*).
3. Perlu dipikirkan jika ada *ceiling* berupa *minimum monthly payment*, apakah adil atau tidak.<sup>17</sup>

## B. Konsep Keadilan Kerjasama dalam Islam

### 1. Pengertian Keadilan

Salah satu dari prinsip dalam bermuamalah yang harus menjadi akhlak dan harus tertanam dalam diri pengusaha adalah sikap adil (Al Adl). Cukupilah bagi alQu'ran telah menjadikan semua tujuan risalah langit adalah melaksanakan keadilan. Al-'Adl (Yang Maha Adil) adalah termasuk diantara nama-nama Allah (Asma' Al-Husna). Lawan kata dari keadilan adalah kezaliman (al-dzulm), yaitu sesuatu yang diharamkan Allah atas diri-Nya sebagaimana telah diharamkan-Nya atas hamba-hamba-Nya. Allah mencintai orang-orang yang berbuat zalim, bahkan melaknat mereka.<sup>18</sup> Firman-Nya:

وَلَيْنَ أَخْرَجْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨﴾

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h. 74

<sup>18</sup> Hermawan Kartajaya, dkk, *Syariah Marketing*, (Bandung: PT .Mizan Pustaka, 2006) h. 112

*Artinya: “ dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat Dusta terhadap Allah?. mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan Para saksi akan berkata: "Orang-orang Inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka". Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim”(Q.S. Al Huud: 8)*

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan juga dapat berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Bertindak secara adil berarti mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan serta tidak bertindak sewenang-wenang.

Keadilan pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara penuntutan hak dan menjalankan kewajiban. Berdasarkan segi etis, manusia diharapkan untuk tidak hanya menuntut hak dan melupakan atau tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali. Sikap dan tindakan manusia yang semata-mata hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya akan mengarah pada pemerasan atau perbudakan terhadap orang lain.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Gading Mahendrata, *Keadilan Dalam Islam dan Bisnis*, artikel ini diakses pada 1 Oktober 2015 dari <http://gadingmahendrata.wordpress.com/2009/11/27/keadilan-dalam-islam-dan-bisnis/>

Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder. Ia adalah dasar dan fondasi yang kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam yang berupa aqidah, syariah, dan akhlak (moral). Ketika Allah memerintahkan tiga hal. Keadilan merupakan hal pertama yang disebutkan.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

*Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An Nahl : 90)*

Ketika Allah memerintahkan dua hal, keadilan salah satu yang disebut.

Firman Allah

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

*Artinya:” Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”*

*(Q.S.An-nisa :58)*

Ketika Allah memerintahkan satu hal, keadilan merupakan hal yang diperintahkan tersebut. Allah berfirman



قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ  
الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

*Artinya: Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". dan (katakanlah):*

*"Luruskanlah muka (diri)mu di Setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)". (Q.S. Al A'raaf:29)*

Implementasi sikap adil dalam bisnis merupakan hal yang sangat berat baik dalam industri perbankan, asuransi, maupun dalam bentuk bentuk perdagangan dan bisnis lainnya. Mungkin karena itulah Allah SWT demikian sering menekankan sikap adil ini ketika berbicara muamalah (bisnis). Sikap adil misalnya, dibutuhkan ketika seorang praktisi dibutuhkan ketika seorang praktisi perbankan syariah menentukan nisbah mudharabah, musyarakah, wakalah, wadiah dan sebagainya. Sikap adil juga diperlukan ketika asuransi syariah menentukan bagi hasil dalam *surplus underwriting*, penentuan bunga teknik( bunga teknik tidak ada dalam asuransi syariah) dan bagi hasil investasi antara perusahaan dan peserta<sup>20</sup>. Pada dasarnya, berbisnis apapun asalkan halal harus selalu berlaku adil bagi orang lain yang ikut andil dalam bisnis tersebut.

Begitu pula dengan bisnis waralaba. Keadilan sangat diperlukan dalam penentuan *franchise fee* dan *royalty fee*. Dalam *penentuan franchisee fee*, seorang pewaralaba harus adil untuk menentukan berapa besar biaya yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnisnya tersebut. Tidak boleh ada biaya terselubung dalam hal

<sup>20</sup> Hermawan Kartajaya, dkk, *Syariah Marketing*, (Bandung: PT .Mizan Pustaka, 2006) h. 114

tersebut. Dan hendaknya pemilik waralaba juga bijak dalam menentukan pengeluaran terwaralaba sehingga tidak membebankan rekan bisnisnya. Demikian pula dalam penentuan *royalty fee*.

## 2. Manfaat Keadilan dalam Konsep Bisnis Islam

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah SAW diutus Allah SWT untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al Quran memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al Maidah : 8)*

Menegakkan keadilan dalam berbisnis tentu sangat disukai oleh Allah SWT. Dengan berlaku adil, tentu saja banyak manfaat yang kita dapatkan, seperti, bisnis kita InsyaAllah akan mendapatkan berkah dari Allah SWT, rekan bisnis akan selalu percaya dengan kuantitas dan kualitas barang yang akan kita perdagangkan, karena mereka yakin kita akan berlaku adil terhadap mereka.

### 3. Konsep Keadilan Bisnis dalam Islam

Bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut Anoraga dan Soegiastuti, bisnis memiliki makna dasar sebagai *“the buying and selling of goods and service”*. Sementara dalam pandangan Straub dan Attner, bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.<sup>21</sup>

Secara umum ajaran Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Dalam Islam terdapat nilai-nilai

---

<sup>21</sup> Gading Mahendrata, *Keadilan Dalam Islam dan Bisnis*, artikel ini diakses pada 1 Oktober 2015 dari <http://gadingmahendrata.wordpress.com/2009/11/27/keadilan-dalam-islam-dan-bisnis/>

dasar etika bisnis, diantaranya adalah tauhid, khilafah, ibadah, tazkiyah dan ihsan. Dari nilai dasar ini dapat diangkat ke prinsip umum tentang keadilan, kejujuran, keterbukaan (transparansi), kebersamaan, kebebasan, tanggungjawab dan akuntabilitas.<sup>22</sup>

Adil sangat diperlukan dalam kegiatan perniagaan supaya tidak merugikan salah satu pihak atau bisa mengeksploitasi orang lain. Berbuat adil akan lebih dekat pada takwa sehingga akan terhindar dari hal hal yang akan mengarah pada perbuatan dosa. Dalam Alquran kata adil disebut berkali kali. Artinya, Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, termasuk di dalamnya adil ketika melakukan perniagaan. Walaupun mungkin telah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya, tetapi perlu digarisbawahi lagi bahwa ada satu hal mendasar dalam penataan hubungan antara manusia yang Islami, yaitu tidak ada yang dizalimi dan tidak ada yang menzalimi atau dalam perkataan lain ditegakkan konsep ‘adil’. Al-Quran menegaskan bahwa keadilan adalah salah satu alasan Allah mengirim rasul-Nya pada manusia. Seperti pada firman Allah SWT sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ  
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن  
يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

*Artinya : Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi -*

<sup>22</sup> Gading Mahendrata, Keadilan Dalam Islam dan Bisnis, artikel ini diakses pada 1 Oktober 2015 dari <http://gadingmahendradata.wordpress.com/2009/11/27/keadilan-dalam-islam-dan-bisnis/>

*yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.(Q.S. Al-Hadid: 25).*

Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa sebagian besar rezeki manusia di peroleh dari aktifitas perdagangan. Hal ini disabdakan beliau dalam hadist yang diriwayatkan oleh Habsyi AL Harabi “*berdaganglah kamu sebab dari sepuluh bagian penghidupan Sembilan diantaranya dihasilkan dari berdagang*”. Dalam ilmu ekonomi, perdagangan secara konvensional dapat diartikan sebagai proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing masing pihak. Mereka yang terlibat dalam aktifitas perdagangan dapat menentukan keuntungan maupun kerugian dari kegiatan tukar menukar secara bebas itu.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, agar diperoleh suatu keharmonisan dalam system perdagangan, diperlukan suatu :perdagangan yang bermoral”. Rasulullah SAW secara jelas telah banyak memberi contoh tentang sistem perdagangan yang jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak. Sabda Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id menegaskan: saudagar yang jujur dan dapat dipercaya

---

<sup>23</sup> Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, penerbit Bumi Aksara, Jakarta 2008 h.45

akan dimasukan dalam golongan para nabi, golongan orang orang jujur dan golongan para syuhada. Hadist tersebut menyatakan bahwa dalam setiap transaksi perdagangan diperintahkan untuk lebih mengutamakan kejujuran dan memegang teguh kepercayaan yang dipegang oleh orang lain.

Berdasarkan hadist tersebut tampak jelas bahwa Muhammad SAW telah mengajarkan untuk bertindak jujur dan adil serta bersikap baik dalam setiap transaksi perdagangan. dalam hal ini kunci keberhasilan dan setiap transaksi perdagangan. Dalam hal ini kunci keberhasilan dan kesuksesan Nabi dalam perdagangan diantaranya adalah dimilikinya sifat sifat terpuji beliau yang sangat dikenal penduduk mekah kala itu, yaitu jujur siddiq), menyampaikan (tabligh), dapat dipercaya (amanah) dan bijaksana (fathanah). Sifat terpuji itulah merupakan kunci kesuksesan Nabi dalam berdagang (Afzalurrahman, 2000). Bersikap adil dan bertindak jujur merupakan prasyarat penting seseorang dalam melakukan perdagangan, disamping menjaga hubungan baik dan berlaku ramah tamah kepada mitra dagang serta para pelanggan. Pedagang yang tidak jujur meskipun mendapat keuntungan dagang yang besar, boleh jadi keuntungan tersebut sifatnya hanya sementara. Ini dikarenakan ketidakjujuran akan menghilangkan kepercayaan para pelanggan sehingga lama kelamaan akan memundurkan dan mematikan usahanya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Era Muslim, “*Media Islam Rujukan*” dikutip pada 11 November 2015 dari [www.eramuslim.com/.../hadist-hadist-tentang-keutamaan-dan-keadilan-sahabat.html](http://www.eramuslim.com/.../hadist-hadist-tentang-keutamaan-dan-keadilan-sahabat.html)

#### 4. Konsep Kerjasama dalam Islam

Kerjasama dalam Islam disebut dengan syirkah. Syirkah menurut bahasa berarti pencampuran. Secara terminologi definisi syirkah adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.dengan adanya akad syirkah yang disepakati diantara kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak hukum terhadap harta syarikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan terhadap harta yang disepakati.<sup>25</sup> Akad syirkah diperbolehkan menurut para ulama fiqh, berdasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi:

...فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

*Artinya: ...Maka mereka berserikat dalam sepertiga harta...(Q.S An-Nisa : 12)*

Konsep kerjasama dalam Islam ada 2 macam:

- a. Syirkah AlMusyarakah. secara etimologi *asy syirkah* berarti percampuran yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya sehingga sulit dibedakan.<sup>26</sup> Sedangkan menurut terminology adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal /*expertise*) denggan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

<sup>25</sup> A.H Azarudin Latif, *Fiqh Muamalat*, (Penerbit: UIN Jakarta Press, Jakarta, 2005) h. 129

<sup>26</sup> Antonio syafii, *Bank syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h.48

- b. Syirkah ada dua jenis syirkah al Amlak (kepemilikan) dan syirkah al uqud (akad / kontrak). Syirkah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam syirkah ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut. Sedangkan syirkah akad tercipta dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Syirkah akad menjadi:

1) Syirkah al-‘Inan

Para ulama fiqih sepakat bahwa syirkah al-‘inan hukumnya boleh. Dalam syirkah ini modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, demikian juga halnya dalam soal tanggung jawab, kerja, keuntungan serta kerugian yang terjadi jumlahnya tidak harus sama dan dilakukan berdasarkan kontrak atau perjanjian. Syirkah al-‘inan merupakan jenis syirkah yang paling banyak diterapkan dalam dunia bisnis, hal ini dikarenakan keluasan ruang lingkupnya dan sistem pelaksanaannya yang fleksibel. Berikut ini beberapa karakteristik dari syirkah al-‘inan :

- a. Besar penyertaan modal dari masing-masing anggota tidak harus sama.
- b. Masing-masing anggota mempunyai hak penuh untuk aktif langsung dalam pengelolaan usaha, tetapi ia juga dapat menggugurkan hak tersebut dari dirinya.



- c. Pembagian keuntungan dapat didasarkan pada persentase modal masing-masing, tetapi dapat pula atas dasar negosiasi.
- d. Kerugian dan keuntungan bersama sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing-masing.

## 2) Syirkah al-Mufawadhah

Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak menyerahkan bagian modal yang jumlahnya sama besar dan ikut berpartisipasi dalam pekerjaan. Demikian pula tanggung jawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. Beberapa syarat dalam syirkah al-mufawadhah adalah sebagai berikut :

- a. Nilai masing-masing pihak harus sama.
- b. Persamaan wewenang dalam bertindak. Dengan demikian tidak sah perserikatan anak kecil dengan orang dewasa.
- c. Persamaan agama. Maka tidak sah perserikatan antara orang muslim dengan non muslim.
- d. Setiap pihak atau mitra harus dapat penjamin atau wakil pihak yang lainnya dalam pembelian dan penjualan barang yang diperlukan.

## 3) Syirkah al-Abdan (*al-A'mal*)

Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang memiliki keahlian atau profesi yang sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dimana keuntungan dibagi bersama. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap proyek atau kerjasam dua orang penjahit untuk menerima order seragam kantor. Profesi dan

keahlian ini bisa sama dan juga bisa berbeda, misalnya tukang kayu dengan tukang besi, mereka menyewa tempat untuk perniagaannya dan bila mendapat keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama. Dalam syirkah ini para mitra hanya menyumbangkan keahlian dan tenaga untuk bisnis tanpa memberikan modal. Syirkah ini lazim disebut juga syirkah al-sanaa'i (syirkah para tukang) atau syirkah al-taqabbul (syirkah penerimaan).

#### 4) Syirkah al-Wujuh

Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memiliki reputasi dan kredibilitas (kepercayaan) dalam melakukan suatu usaha. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi sama. Syirkah semacam ini mirip dengan makelar yang banyak dilakukan orang pada zaman modern sekarang ini. Dalam perserikatan ini pihak yang berserikat membeli suatu barang hanya didasarkan kepada kepercayaan yang kemudian barang tersebut mereka bayar dengan tunai. Sama halnya dengan syirkah abdan, dimana para mitra hanya menyumbangkan keahlian dan tenaganya untuk mengelola bisnis tanpa memberikan modal, dalam syirkah wujuh para mitra juga hanya menyumbangkan *goodwill*, *credit worthiness* dan hubungan-hubungan (kontak-kontak) mereka untuk mempromosikan bisnis mereka tanpa menyetorkan modal. Oleh karena itu biasanya kedua bentuk kemitraan ini terbatas hanya digunakan untuk usaha kecil saja.

Beberapa syarat pokok Musyarakah menurut Usmani (1998) antara lain:

1. Syarat Akad. Karena musyarakah merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu: 1) syarat berlakunya akad (In'Iqod), 2) syarat sahnya akad (Shihah) 3) syarat terealisasinya akad (Nafadz) dan 4) syarat *lazim* juga harus dipenuhi. Misalnya para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad (ahliyah dan wilayah), akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru dan sebagainya.
2. Pembagian proporsi keuntungan. Dalam pembagian proporsi keuntungan, harus dipenuhi hal-hal berikut:
  - a. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati diawal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
  - b. Rasio / nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsom untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.
3. Penentuan proporsi keuntungan. Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat para ahli hukum Islam sebagai berikut:
  - a. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.

Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.

- b. Imam Abu Hanifah yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian mitra yang memutuskan untuk menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.<sup>28</sup>



---

<sup>28</sup> Antonio syafii, *Bank syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h.172

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Sistem Pelaksanaan Waralaba Menurut Hukum Islam*

Pada bisnis waralaba terdapat perjanjian waralaba atau *franchising*, artinya antara *franchisor* dan *franchisee* terbentuk hubungan kerja sama untuk waktu tertentu (sesuai dengan perjanjian) dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak dengan cara kerja sama baik dalam bentuk pemberian izin menggunakan merek atau brand dan resep dagang tertentu atau standar operasional prosedural maupun dalam pembinaan keahlian tenaga kerja atau salah satu pihak mengeluarkan tenaga dan pihak lain hanya mengeluarkan modal usaha dengan perjanjian keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan. Dalam kaidah Fiqih dikatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalat dibenarkan syara', kecuali bila terdapat dalil-dalil Al Quran atau Hadits Nabi yang melarangnya sehingga dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan umum dalam hukum Islam bahwa prinsip dasar bermuamalah harus dipenuhi perjanjian untuk kegiatan yang mengandung maslahat, menjunjung tinggi prinsip keadilan, jujur, saling tolong menolong, tidak mempersulit, suka sama suka, serta menjauhi segala unsur penyimpangan antara lain : Maysir (spekulasi), Asusila, Gharar (penipuan), Haram, Riba, Ikhtikar (monopoli/menimbun barang), dan Dharar (berbahaya), sehingga terhindar dari berbagai penyimpangan bisnis dan mengedepankan nilai syariah sebagai filter moral bisnisnya.

Norma-norma hukum Islam tersebut dapat dijenjangkan sebagai berikut :

1. Nilai-nilai dasar atau norma-norma filosofis (*al-qiyam al-asasiyyah*)
2. Asas-asas umum (*al-ushul al-kulliyah*)
3. Peraturan-peraturan hukum konkret (*al-ahkam al-farhiyyah*)

Norma-norma filosofis adalah nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi ajaran Islam termasuk hukumnya seperti kemaslahatan, keadilan, persamaan, kebebasan, akidah, akhlak, persaudaraan, (*al-ukhuwwah*) dan sebagainya. Ini menjadi dasar dari asas-asas umum sebagai norma tengah, sebagaimana yang berlaku dalam perjanjian, pidana, siyasah, dan seterusnya yang bersifat lepas atau disebut asas-asas hukum Islam (*an-nazhariyyah al-fiqhiyyah*), dan adapula yang bersifat singkat dan padat dalam rumusan yang disebut kaidah-kaidah hukum Islam (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*) antara lain :

- Adat atau kebiasaan adalah sumber hukum,
- Pada dasarnya perjanjian adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah perikatan yang mereka tetapkan melalui janji.
- Tidak ada perbuatan merugikan diri sendiri dan perbuatan merugikan orang lain.
- Kesukaran membawa kemudahan, dan masih banyak lagi.

Peraturan-peraturan hukum konkret adalah asas-asas umum yang telah diwujudkan dalam ketentuan-ketentuan hukum *taklifi* (halal, haram, wajib, sunat, makruh, dan mubah) maupun dalam ketentuan hukum *wadh'i* yang meliputi sebab, syarat, dan halangan. Hukum konkret pada hukum *taklifi*

contohnya keharaman transaksi riba, wajibnya memenuhi isi perjanjian, dan lain-lain. Sedangkan hukum konkret pada hukum *wadh'i* contohnya penundaan pembayaran utang oleh debitur membolehkan pengumuman penagihan atau pengenaan hukuman, adanya saksi pada aqad (perjanjian), keadaan memaksa yang dapat menjadi penghalang pelaksanaan perjanjian, dan lain-lain.

Sumber hukum utama dalam hukum Islam tentunya Al Quran, yang walaupun bukan kitab undang-undang hukum (*legal code*), tetapi merupakan petunjuk secara umum sebagai bimbingan bagi seluruh umat manusia, sehingga ketentuan-ketentuan hukum di dalamnya bersifat umum, tidak mendetail secara rinci namun berfungsi sebagai kaidah-kaidah umum, kecuali beberap butir ketentuan yang merinci hukum-hukumnya seperti pada masalah perkawinan/pernikahan dan kewarisan yang lebih detailnya lagi dijelaskan dalam Sunnah atau hadis Rasulullah Muhammad SAW sebagai sumber hukum utama kedua. Sumber hukum yang berikutnya adalah ijmak, qiyas, maslahat mursalah, istihsan, istishab, dan 'urf atau adat/kebiasaan.

Hukum Islam mengenal sistem yang disebut "*Syirkah*", dimana ada 2 klasifikasi utama yaitu *syirkah al-amlak* dan *syirkah al-uqud*. *Syirkah al-amlak* disebut juga *musyarakah pemilikan* sedangkan *syirkah al-uqud* disebut juga *musyarakah aqad (kontrak)*, atau *perserikatan suatu aqad*. Jika diperhatikan dari sudut bentuk perjanjian yang diadakan waralaba (*franchising*) dapat dikemukakan bahwa perjanjian waralaba sebenarnya merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama (*syirkah*).

Konstruksi perjanjian berdasarkan hukum Islam, selain harus memenuhi prinsip bermuamalah juga harus terpenuhi rukun dan syarat sahnya perjanjian. Disamping itu, ada ketentuan tentang kewajiban memenuhi perjanjian dan larangan bekerjasama melakukan suatu dosa, serta adanya kecakapan bagi pihak-pihak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pada pelaksanaan bisnis waralaba dapat dipahami bahwa dalam perjanjian waralaba tidak terdapat halangan-halangan atau larangan dalam fiqih muamalah, terpenuhinya rukun, syarat dan prinsip dasar bermuamalah, sehingga dibolehkan dan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perjanjian pada umumnya. Asas-asas perjanjian dalam hukum Islam antara lain :

1. Asas Ibahah (*Mabda'al-Ibahah*), dengan adagium "*Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.*" Jadi semua tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut, termasuk pada sistem waralaba ini.
2. Asas kebebasan beraqad (*Mabda hurriyyah at ta'aqud*), bahwa setiap orang dapat membuat aqad jenis apapun dan dapat memasukkan klausul apa saja ke dalam aqad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya, termasuk pada kontrak/perjanjian waralaba. Tentunya sejauh tidak berakibat memakan harta sesama dengan jalan batil.



3. Asas konsensualisme (*Mabda Ar-radha'iyah*), bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak, dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji tersebut, artinya bila telah tercapai kata sepakat para pihak, maka terciptalah suatu perjanjian. Franchising hanya dapat dilaksanakan apabila ada kata sepakat para pihak.
4. Asas janji itu mengikat, janji itu adalah utang, dan janji itu juga akan dimintakan pertanggung jawabannya oleh Allah SWT.
5. Asas Keseimbangan (*Mabda' at tawazun fi al mu'awadhah*), hukum perjanjian dalam Islam menekankan perlunya keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan misalnya oleh franchisor dan apa yang diterima misalnya oleh franchisee maupun keseimbangan dalam transaksi dan memikul resiko bisnis, sehingga tidak akan ada unsur riba di dalamnya.
6. Asas Kemaslahatan, dimaksudkan bahwa antara franchisor dengan franchisee tidak saling memberatkan, aqad yang dibuat bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak menimbulkan kerugian atau hal yang memberatkan bagi para pihak dalam franchising tersebut.
7. Asas Amanah, bahwa diperlukan iktikad baik para pihak baik franchisor maupun franchisee sehingga nantinya tidak ada eksploitasi ketidaktahuan para mitra franchising. Artinya pihak

franchisee dituntut mengetahui dan paham betul seluk beluk franchising pada waralaba yang digelutinya.

8. Asas Keadilan, sebagai tujuan hukum yang hendak diwujudkan.

Para pihak waralaba harus dapat melakukan negosiasi mengenai klausul aqad waralabanya. Syarat baku harus dapat diubah menjadi fleksibel disesuaikan dengan keadaan dan kondisi mitra waralaba apabila memang ada alasan untuk itu.

***B. Analisis Penerapan Materi Hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Bisnis Waralaba Syariah.***

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdiri dari 4 (empat) buku yang terdiri dari 790 pasal setelah direvisi tahun 2010, dengan perincian sebagai berikut:

- Buku I tentang Subyek Hukum dan Amwal.
- Buku II tentang Akad.
- Buku III tentang Zakat dan Hibah.
- Buku IV tentang Akuntansi Syariah.

Pada analisis ini kita dapat pembahasan yang berkaitan dengan bisnis waralaba pada Buku I dan Buku II. Dalam Buku I yang terdiri dari 3 bab ini menerangkan tentang subjek hukum. Pada Bab I, diatur tentang ketentuan umum. Bab II menjelaskan subyek hukum yang meliputi tentang kecakapan subjek hukum yang dapat atau tidak dapat melakukan perbuatan hukum, dan

ketentuan dalam perwalian, yang dalam perwalian tersebut terjadi akibat dari orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pada bab III, diatur tentang *amwal* atau kebendaan yang di dalamnya dibahas tentang asas kepemilikan, cara memperoleh, dan sifat kepemilikan dari *amwal* tersebut.

Buku II terdiri atas 29 bab. Buku ini mengatur tentang akad yang berkaitan dengan kesepakatan dalam mengadakan suatu perjanjian. Pada bab I, diatur tentang ketentuan umum dan bab II mengatur tentang asas-asas dari akad tersebut.

Pada bab III, bagian I, mengatur tentang rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad. Pada bagian II, dijelaskan tentang hal yang termasuk kategori hukum akad itu. Bagian III menerangkan aib kesepakatan atau sahnya akad kesepakatan dalam suatu perjanjian. Bagian IV menerangkan pihak yang dianggap melakukan ingkar janji dan sanksinya. Bagian V menerangkan tentang keadaan memaksa dalam suatu akad. Bagian VI menerangkan tentang risiko yang dipikul oleh para pihak dalam akad. Bagian VII menjelaskan tentang akibat akad terhadap para pihak. Bagian VIII menerangkan tentang penafsiran dari redaksi akad tersebut.

Bab IV, bagian I, menerangkan unsur ba'i yang secara umum disebut jual beli. Bagian II menjelaskan tentang kesepakatan penjual dan pembeli. Bagian III menjelaskan tempat dan syarat pelaksanaan ba'i.

Bagian IV menjelaskan tentang *ba'i* dengan syarat khusus. Bagian V menjelaskan tentang berakhirnya akad *ba'i*. Bagian VI menjelaskan objek akad. Bagian VII menjelaskan tentang hak harga dan barang setelah akad *ba'i*. Bagian VIII menjelaskan tentang serah terima pada *ba'i*.

Bab V membahas tentang akibat *ba'i*, *ba'i salam*, *ba'i istishnâ'*, *ba'i* yang dilakukan oleh orang yang menderita sakit keras, *ba'i al-wafa'*, *ba'i al-murabahah*, dan konversi akad *murâbahah*.

Bab VI membahas tentang akad *syirkah*. Bab ini menjelaskan tentang ketentuan umum *syirkah*, *syirkah al-amwâl*, *syirkah 'abdân*, *syirkah mufawwadhhah*, *syirkah 'inân*, dan *syirkah musytarakah*.

Bab VII membahas tentang *syirkah milk*, yaitu mencakup pembahasan mengenai ketentuan *syirkah milk*, pemanfaatan *syirkah milk*, hak atas piutang bersama, pemisahan hak milik bersama, syarat-syarat pemisahan dan cara pemisahan.

Bab VIII mengupas tentang *Mudhârabah*, di mana pembahasannya mencakup syarat dan rukun *mudhârabah* beserta ketentuan-ketuannya.

Bab XVII membahas tentang *wakâlah*. Dalam bab ini dijelaskan tentang rukun, syarat, macam-macam dan ketentuan umum *wakâlah*. Di dalamnya diterangkan juga tentang pemberian kuasa kepada pembeli, penjual dan gugatan, serta pencabutan kuasa.

## BAB V

### PENUTUP

#### ***A. Kesimpulan***

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa tonggak kepastian hukum tentang format waralaba dimulai saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah melalui PP Nomor. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, menjadikan perjanjian waralaba sebagai perjanjian formal dimana disyaratkan pada pasal 2 PP Nomor No.16 Tahun 1997 untuk dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba. Untuk menciptakan sistem bisnis waralaba yang Islami, diperlukan sistem nilai syariah sebagai standar filter bisnis dalam rangka menghindari berbagai penyimpangan bisnis yang jauh dari *Maysir* (spekulasi), *Asusila*, *Gharar* (penipuan), *Haram*, *Riba*, *Ikhtikar* (monopoli/menimbun barang), dan *Dharar* (berbahaya).

Konstruksi bisnis waralaba berdasarkan hukum Islam, selain harus memenuhi prinsip bermuamalah di atas juga harus terpenuhi rukun dan syarat sahnya perjanjian, dan tentang kewajiban memenuhi perjanjian dan larangan bekerjasama dalam hal dosa, serta adanya kecakapan bagi pihak-pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Perjanjian waralaba merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama (*syirkah*), dimana antara franchisor dan franchisee terbentuk hubungan kerjasama sesuai perjanjian untuk memperoleh profit bersama, baik dalam bentuk pemberian izin menggunakan brand/merk tertentu, atau kerjasama dalam pembinaan keahlian tenaga kerja, atau salah

satu pihak mengeluarkan tenaga dan pihak lain hanya mengeluarkan modal usaha dengan perjanjian keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan.

Positifisasi hukum Islam di Indonesia sebagaimana dalam Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 kemudian dirubah melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan amandemen undang-undang Peradilan Agama terakhir melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pada pasal 49 bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (i)ekonomi syariah. Penjelasan pasal ini Pada Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Penjelasan huruf (i), yang dimaksud “*ekonomi syariah*” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, salah satunya pada poin (j) meliputi bisnis syariah.

Sebagai pedoman bagi hakim mengenai hukum ekonomi menurut prinsip syariah di peradilan agama sebagai pertimbangan, di tetapkanlah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dimana pasal 1 disebutkan Hakim pengadilan di lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, ini tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali

dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar. Perma ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya pada tanggal 10 September 2008. Sehingga bisnis waralaba ini penyusun simpulkan analisis hukum Islamnya melalui penelitian pustaka menurut kompilasi hukum ekonomi syariah.

### **B. Saran**

1. Adanya ketimpangan dan ketidakseimbangan dalam pola franchising dalam bisnis waralaba dimungkinkan apabila tidak ada filter dasar dalam hal ini prinsip-prinsip syariah. Rumusan kompilasi hukum ekonomi syariah sesuai lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 dapat dijadikan sebagai pedoman mengenai penjabaran nilai-nilai syariah dalam bisnis waralaba yang sesuai dengan prinsip bisnis syariah.
2. Apabila hukum Islam mampu menawarkan keadilan dan kemaslahatan di bidang ekonomi, maka peraturan perundang-undangan (UU Peradilan Agama) yang bersifat lebih represif juga harus mampu dan efektif didalam menjalankan peranannya sebagai produk legilasi. Artinya, eksistensi undang-undang Peradilan Agama sebagai dasar dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini dijadikan adalah sebagai alat untuk melaksanakan hukum islam yang berkaitan dengan ekonomi syariah khususnya yang meliputi kegiatan bisnis syariah. Tanpa perundang-undangan (legislasi), supremasi hukum terhadap penyimpangan di bidang ekonomi syariah tidak dapat ditegakkan.

3. Kaitannya dengan penelitian ini, maka diperlukan suatu upaya kritis dari berbagai pihak untuk mengkaji dan menganalisa tentunya diiringi dengan penelitian-penelitian yang berkelanjutan, sebab tidak ada suatu kajian yang bersifat final, karena kehidupan senantiasa berubah dan berkembang, sehingga menuntut adanya respon positif mengenai produk-produk hukum ekonomi syariah demi perkembangan dan kemajuan masyarakat yang akan semakin kompleks dimasa mendatang.





## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim*

Abdul Mughits, ***Kompilasi hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam***, Jurnal Al-Mawarid, Edisi XVIII Tahun 2008, Hlm. 143

Afdawaiza, ***Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam***, Jurnal Al-Mawarid, Edisi XVIII, Tahun 2008, Hlm. 199.

A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, ***Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia***, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.

A. Qodri Azizy, ***Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum)***, Gama Media Offset, Yogyakarta, 2004.

Abdul Halim, ***Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia***, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.

Ahmad Azhar Basyir, ***Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)***, UII Press, Yogyakarta, 2000.

Burhanuddin S, ***Hukum Kontrak Syariah***, BPFE, Yogyakarta, 2009.

C.S.T Kansil, ***Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, ***Hukum Perjanjian dalam Islam***, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Gemala Dewi, et.al, ***Hukum Perikatan Islam di Indonesia***, Kencana, Jakarta, 2006.

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, ***Hapusnya Perikatan***, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.

Mohammad Daud Ali, ***Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Muhammad Syafii Antonio, ***Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik***, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.

R. Subekti, ***Hukum Perjanjian***, Intermasa, Bandung, 1978.

Subekti dan Tjitrosudibio (Penerjemah), ***Kitab Undang-undang Hukum Perdata***, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Syamsul Anwar, ***Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Mu'amalat***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

T.M Hasbi al-Shiddieqiyy, ***Pengantar Fiqh Mu'amalah***, Bulan Bintang , Jakarta, 1974.

Tim Penyusun, ***Kamus Bahasa Indonesia***, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, 2005.

Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008.

[http://www.badilag.net/index.php?option=com\\_content/task=view&id=2646  
& Itemid=396](http://www.badilag.net/index.php?option=com_content/task=view&id=2646&Itemid=396)

[http://www.ekonomisyariah.org/?page=newsview&command=detail&sheet=1  
&id1=449](http://www.ekonomisyariah.org/?page=newsview&command=detail&sheet=1&id1=449)

[http://lumbuun.blogspot.com/2010/07/perma-menant-revisi-uu-nomor-  
10- tahun.html](http://lumbuun.blogspot.com/2010/07/perma-menant-revisi-uu-nomor-10-tahun.html)

<http://www.mahkamahagung.go.id/pr2news.asp?bid=7>

[http://rudini76ban.wordpress.com/2009/03/21/fungsi-peraturan-  
perundang- undangan](http://rudini76ban.wordpress.com/2009/03/21/fungsi-peraturan-perundang-undangan)

## RIWAYAT HIDUP



Dirhamzah, lahir di Sungguminasa pada tanggal 05 Desember 1989. Anak kedua dari tiga bersaudara. Mulai mengecap pendidikan di TK Kemala Bhayangkari Batangkaluku Kabupaten Gowa pada tahun 1990 dan tamat pada tahun 1991.

Kemudian melanjutkan pendidikannya di SD Inpres Bontoala I Pallangga Kabupaten Gowa di tahun yang sama hingga tamat pada tahun 1998. Kemudian melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa tamat pada tahun 2001. Di tahun yang sama melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Pertama kali mengenyam dunia perguruan tinggi di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2004 melalui jalur SPMB pada Jurusan Politik Pemerintahan Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip UH), aktif sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Makassar hingga akhirnya kandas pada tahun 2006 dan memilih mundur sebagai mahasiswa karena alasan kedinasan sebagai CPNS Pusat Kementerian Perhubungan. Dengan berbekal Transkrip Nilai dari Fisip Unhas melanjutkan pendidikan sebagai Taruna di Akademi Maritim Indonesia Veteran (AMI veteran RI) Makassar (Sekarang dikenal sebagai Politeknik Maritim/Polimarim AMI Makassar) Jurusan Nautika Pelayaran Kapal Niaga pada Program Diploma Tiga dan selesai pada Tahun 2010. Pada Tahun 2008 sempat mendaftar dan aktif sebagai mahasiswa Universitas Terbuka pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara (Sekarang menjadi Prodi Administrasi Publik) hingga saat ini. Perubahan sistem penerimaan mahasiswa baru menjadi sistem online memungkinkan dirinya mendaftar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada tahun 2011 dan atas berkat Rahmat Allah SWT dapat diterima sebagai Mahasiswa pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum sebagai Mahasiswa baru pada usianya yang sudah menginjak 25 tahun dan Alhamdulillah menyelesaikan studi pada tahun 2015 tepatnya di usia 29 tahun.